



P A R A

P O L I T I S I

D A N L A G U N Y A

Kumpulan Kolom

DENNY J.A.

Rakyat Merdeka & Sindo

Editor:

Fransiskus Surdiasis

LKIS

DENNY J.A

PARA POLITISI DAN LAGUNYA

Kumpulan Kolom
Denny J.A
Rakyat Merdeka & Sindo

Kumpulan Kolom Denny J.A.
Rakyat Merdeka & Sindo
Para Politisi dan Lagunya
Denny J.A.

(c) Denny J.A.

xii + 110 halaman: 14.5 x 21 cm

1. Ilmu Politik
2. ISBN : 979-25-5233-2

Editor : Fransiskus Surdiasis
Rancang Sampul : Imam Syahirul Alim
Setting/ layout : Santo

Penerbit
LKIS Yogyakarta
Salakan Baru No.1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km.4,4 Sewon Bantul
Tlp (0274) 387194/7472110
Faks (0274) 417762

Cetakan I : Agustus 2006

D
E
N
N
Y
J
-
A

DENNY J.A

*Untuk Tiga Matahari :
Mulia Jayaputri Istriku,
Rafi dan Ramy Anakku*

Pengantar

Tahun 2005 adalah tahun pertama pemerintahan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang populer dengan akronim SBY-JK. Setelah mendapatkan dukungan pemilih pada pemilu 2004, dan umbul-umbul pesta demokrasi itu sudah disingkirkan dari jalan-jalan kota, SBY-Kalla mulai menghadapi kenyataan politik yang sesungguhnya.

Janji-janji pemilu ternyata tidak mudah dikonversi ke dalam kebijakan public. Harapan tinggi yang dimiliki para pemilih ketika mereka masuk ke bilik-bilik suara saat pemilu berubah menjadi beban bagi presiden terpilih. Public ingin melihat perubahan nyata pada 100 hari pertama.

Setelah melewati 100 hari pertama, perlahan-lahan perasaan kecewa public merambat naik. Belakangan beberapa kebijakan tidak populer pemerintahan SBY-Kalla ikut mendongkrak perasaan kecewa masyarakat luas. Puncaknya adalah ketika pemerintah menaikkan harga BBM untuk kedua kalinya di tahun 2005 pada Oktober tahun itu, dengan presentasi kenaikan yang sangat tinggi. Survey lingkaran Survei Indonesia di triwulan terakhir tahun 2005 memperlihatkan secara meyakinkan kemerosotan popularitas SBY-Kalla tersebut.

Sejalan dengan itu para politisi mulai memanfaatkan perasaan kecewa public demi kepentingan politik masing-masing. Tuntutan perombakan cabinet demi perbaikan kinerja meningkat, yang kemudian direspon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Grafik gerak politik pada tahun pertama pemerintahan SBY-Kalla itu terekam dengan baik dalam artikel-artikel yang ditulis Denny J.A., penulis buku ini.

Artikel-artikel dalam buku ini merupakan kolom reguler pada *Harian Rakyat Merdeka* dalam rubrik *Hot Politics* setiap hari Senin dan pada *Harian Seputar Indonesia (Sindo)* dalam rubrik *Catatan Politik Minggu Ini* setiap hari Kamis. Artikel-artikel ini kemudian dibukukan dengan judul *Para Politisi dan Lagunya*. Judul ini diambil dari salah satu judul kolom penulis di rubrik *Hot Politics Rakyat Merdeka*. Judul dan deskripsi dalam tulisan itu menggambarkan secara pas situasi politik Indonesia tahun pertama setelah pemilu, yang kembali diwarnai oleh manuver kepentingan elit.

Ada 33 artikel, masing-masing 19 artikel di *Rakyat Merdeka* dan 14 artikel di *Sindo*. Untuk memudahkan pembaca, artikel-artikel ini dikelompokkan berdasarkan medianya dengan urutan waktu pemuatannya. Dengan demikian, pembaca bisa menikmati kekhasan bahasa pada masing-masing media sekaligus irama persoalan yang dibicarakan.

Tidak ada perubahan berarti yang dibuat pada artikel-artikel tersebut. Keasliannya dijaga agar tulisan-tulisan ini menjadi semacam museum yang membantu kita menghayati satu proses dalam kehidupan berbangsa kita. Dengan membaca tulisan-tulisan ini kita diharapkan dibawa kembali ke dalam satu fragmen sejarah, namun pada saat yang sama tetap mampu melakukan dialog intelektual atas substansi persoalan yang tengah diperbincangkan guna menarik relevansinya dengan situasi kekinian.

Membagi perspektif atas pengalaman kolektif kita sebagai sebuah bangsa adalah sebagian ikhtiar untuk merawat, menjaga dan memajukan negeri ini. Itulah yang mendorong Denny J.A. begitu produktif dalam menghasilkan kolom-kolom di media massa. Spirit yang samalah yang mendorong penulis menyatukan artikel-artikel tersebut ke dalam buku kecil yang sekarang ada di tangan Anda ini.

Selamat membaca! Semoga buku kecil ini bermanfaat!

Jakarta, Agustus 2006

Fransiskus Surdiasis

Editor

DENNY J.-A

Daftar Isi

Pengantar ...

Daftar Isi ...

Hot Politics

1. BBM + Pengangguran + Aceh * ..
2. Para Politisi dan Lagunya * ...
3. Momentum untuk Oposisi * ...
4. Menjaga SBY - JK * ...
5. Kotak Pandora BBM * ...
6. Berani atau Nekat * ...
7. Obor Oposisi * ...
8. Wacana Impeachment * ...
9. Setahun SBY-JK * ...
10. SBY atau JK? * ...
11. Politik Orang Miskin * ...
12. Pemerintahan di Simpang Jalan ? * ...
13. JK: Man Of The Year* ...
14. Kembalinya Pesona SBY? * ...
15. Politik Lima Sekawan * ...
16. Tritunggal 2005: SBY, JK, Sutanto * ...

17. Langkah Historis di Aceh *...
18. Heboh Mobil Jaguar *...
19. Beroposisi Soal Impor Beras ? *...

Catatan Politik Minggu Ini

1. Negara Dalam Negara di Aceh? * ...
2. Aceh yang Membelah Kita * ...
3. Publik Menyalahkan Team Ekonomi * ...
4. Tes Kepemimpinan Presiden * ...
5. Politik Dua Mantan Presiden* ...
6. Lahirnya Politik Oposisi * ...
7. Politik Api dalam Sekam *...
8. Bola Liar Surat MK *...
9. Sandungan Setahun SBY-JK? *...
10. Momentum SBY-JK Tahun Kedua*...
11. Menunggu Sinyal Perubahan SBY-JK?*...
12. Konsolidasi Politik Tahun Kedua*...
13. Aceh Pasca MoU Helsinki*...
14. Kasus Partai Kebangkitan Bangsa*...

Sumber Naskah *...

Data Buku Denny J.A * ...

DENNY J. A

HOT POLITICS

BBM + Pengangguran + Aceh

Akankah politik Indonesia segera memasuki kembali periode gunjang-ganjing? Inilah pertanyaan paling panas yang mendominasi komunitas elit politik nasional saat ini. Rupiah melemah menembus nilai tukar dollar AS Rp 10,000,-. Memori kolektif publik segera teringat era Pak Harto. Saat itu rupiah jatuh bebas di hadapan dollar AS. Fluktuasi cepat rupiah itu segera diikuti goro-goro politik. Ujung dari gunjang-ganjing itu adalah jatuhnya tokoh politik paling kuat dalam sejarah Indonesia modern.

Kini, pencabutan subsidi BBM sudah menjadi wacana. Namun efek kenaikan BBM itu segera dirasakan publik luas, tidak hanya di kalangan elit. Harga transportasi naik. Sebagai akibatnya, harga barang pokok juga naik. Sementara penghasilan kelompok menengah ke bawah sudah pas-pasan. Ketidakpuasan atas situasi ekonomi rumah tangga dengan mudah diterjemahkan menjadi ketidakpuasan atas kinerja pemerintah.

Bahkan pakar ekonomi yang kredibel juga terbelah mengenai efek dari kenaikan harga BBM. Sebagian berpendapat, dengan kompensasi yang benar, kenaikan BBM itu dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun tak kalah canggih, dengan model ekonomi yang sama, ekonomi lain dapat menunjukkan bahwa walau ditambah kompensasi, kenaikan BBM itu segera menambah jumlah orang miskin di Indonesia.

Oposisi segera mendapatkan panggung dan momentum. Isu BBM yang panas segera disnergikan dengan isu panas lainnya, seperti pengangguran. Banyak prestasi yang sudah diukir dalam setahun pemerintahan SBY-JK. Namun pemerintahan SBY-JK mempunyai titik lemah justru di masalah yang paling rawan: pengangguran. Oposisi segera menjadikan isu pengangguran + kenaikan harga BBM sebagai bukti bahwa setahun SBY-JK gagal mensejahterakan rakyat Indonesia seperti yang dijanjikan ketika kampanye.

Untuk menambah dukungannya, pihak oposisi juga mengungkit kembali kasus damai di Aceh. Melalui Aceh, sentiment nasionalisme public luas dapat diganggu dengan isu pemerintah pemerintah RI telah dikalahkan dengan telak oleh GAM. dikutip pula berbagai pernyataan pimpinan GAM, bahwa dengan damai di Aceh itu GAM tidak membubarkan diri, dan tidak pula berarti GAM membuang aspirasinya untuk merdeka.

Isu BBM + pengangguran + Aceh segera menyatukan oposisi dalam segmen yang sangat luas. Tidak hanya partai besar yang masuk dalam barisan oposisi, tetapi juga segmen aktivitas mahasiswa, buruh, purnawirawan tentara, LSM, dan grass root. Amien Rais, Megawati, Wiranto, Gus Dur, Akbar Tandjung segera ditokohkan kembali. Oposisi semakin kuat jika lima tokoh ini bersatu.

SBY - JK sudah terbukti berani mengambil keputusan sulit dan mampu mengatasi gejolak. Menjelang setahun

pemerintahannya, SBY – JK kembali diuji untuk mengambil keputusan yang teramat dilematis mengenai BBM itu. *

Para Politisi dan Lagunya

Situasi gonjang-ganjing saat ini membuat para politisi senang berdentang. Mereka kini mempunyai lagu favorit sesuai dengan tugas dan kepentingan politiknya.

Presiden dan wakil presiden menyukai lagu Berlian Hutahuruk yang populer di tahun 1980-an. Judul lagunya “Badai Pasti Berlalu”. Judulnya sesuai dengan harapan dua tokoh politik utama itu, bahwa badai yang ada saat ini pada waktunya akan berlalu.

Mereka akan menyatakan badai saat ini berbeda dengan badai di tahun 1998. Tujuh tahun lalu, memang gonjang-ganjing rupiah berujung dengan jatuhnya Soeharto. Namun badai saat ini hanya gonjang ganjing rupiah saja.

Politisi di Kementerian Ekonomi dan Keuangan punya lagu favorit yang berbeda. Mereka menggemari lagu memelas di tahun 1970-an. Liriknyanya antara lain: “Apakah salahku, apakah

dosaku. Sampai ku begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya.”

Menteri Perekonomian heran mengapa mereka yang disalahkan. Padahal menurut mereka semua gunjang-ganjing ini terjadi akibat masalah ekonomi global dan harga minyak internasional. Siapapun yang menjadi menteri perekonomian akan menghadapi hal yang sama. Situasi saat ini tidak ada hubungannya dengan kinerja mereka.

Menteri di luar perekonomian ikut menjadi resah. Isu reshuffle segera menjadi wacana. Para menteri yang merasa kinerjanya pas-pasan kini menggemari lagu “Kemesraan”. Syairnya antara lain, “kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini inginku kenang selalu.” Mereka tidak ingin kemesraan dengan presiden berlalu karena di-reshuffle.

Para pakar, akademisi dan pengamat juga punya lagunya sendiri. Yang mereka pilih lagu Koes Ploes di tahun 1970-an. Mereka ulang-ulang liriknya, “Mengapa bimbang dan ragu. Percayalah kepadaku. Kutulus setia padamu.” Mereka menyangkan mengapa presiden tampak bimbang dan ragu-ragu dengan saran yang diajukan. Padahal saran mereka tulus karena setia kepada Negara, baik untuk reshuffle cabinet ataupun kenaikan harga BBM. Akibatnya, presiden dianggap lambat mengambil keputusan, beralih dari satu wacana ke wacana saja.

Oposisi punya lagu kegemaran yang lebih semarak. Mereka sangat senang petikan lagu Halo-halo Bandung, terutama bagian akhirnya: “Sekarang telah menjadi lautan api. Mari Bung, rebut kembali.” Berbagai persiapan dan konsolidasi dilakukan untuk merebut kembali kepercayaan rakyat.

Berbagai lagu ini dinyanyikan di panggung yang sama dan disaat bersamaan. Itulah sebabnya, keseluruhan lagu itu terasa

sumbang. Para pendengar ingin sebuah orchestra dimana masing-masing pemain mendengarkan nada yang berbeda tetapi tetap harmoni dan manis didengar. Yang ada saat ini bukan orchestra tetapi hiruk pikuk nada yang saling membuat sumbang.*

Momentum Untuk Oposisi?

Ibarat permainan catur, kalangan oposisi kini sudah memulai langkah pembuka. Gus Dur memimpin demonstrasi “mengepung” Istana. Berbagai patron politik, Akbar Tandjung, Taufik Kiemas, Try Soetrisno dan Gus Dur berkumpul menolak MOU RI-GAM. Pakar yang juga politisi Ryass Rasyid mulai mewacanakan impeachment terhadap presiden. Gerakan mahasiswa mulai aktif demo, membakar foto menteri hingga foto presiden.

Apakah gerakan oposisi ini hanya kerikil dalam sepatu saja yang segera padam? Ataukah oposisi ini akan menggelinding bagai bola salju? Pelan tetapi pasti, misalnya, oposisi ini membesar, didukung masyarakat luas? Lalu kisah perubahan kekuasaan di era Soeharto terulang kembali?

Semua sangat tergantung pada level ketidakpuasan masyarakat luas atas kehidupannya saat ini. Oposisi itu ibarat pohon. Ketidakpuasan masyarakat adalah tanahnya. Semakin

public tidak puas, semakin oposisi tumbuh subur, membesar dan berbuah. Sebaliknya, jika public puas dengan situasinya, oposisi tumbuh ala kadarnya saja.

Indonesia pernah mengalami ketidakpuasan masyarakat yang sangat luas. Umumnya ketidakpuasan itu berakar pada memburuknya perekonomian nasional. rakyat banyak merasakan kehidupan yang semakin sulit. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Bahan sembako langka. Pengangguran tinggi. Pemerintah dianggap gagal mengurus rakyatnya.

Dengan level ketidakpuasan seperti itu, siapapun presidennya segera tumbang. Apa kurangnya Bung Karno? Ia adalah proklamator bangsa. Kharismanya selaku politisi tidak tertandingi sampai hari ini. Bung Karno pun terjungkal oleh ketidakpuasan itu.

Apa kurangnya Soeharto? Ia politisi yang paling kuat dalam sejarah Indonesia modern. Militer, pengusaha, parlemen, partai politik, birokrasi, dan pers berada dalam kontrolnya. Pak Harto juga terjungkal karena meluasnya ketidakpuasan rakyat atas ekonomi.

Kondisi ekonomi yang akan menentukan nasib oposisi sekaligus juga nasib SBY-JK. Bagi public luas, masalah ekonomi adalah yang paling penting. Survey terakhir Lingkaran Survey Indonesia (LSI) bulan Agustus 2005 menunjukkan 61% dari public luas menganggap prioritas pemerintah haruslah masalah ekonomi. Sebagai apapun prestasi di bidang lain, jika ekonomi memburuk, mayoritas rakyat akan tidak puas.

Gejala ketidakpuasan public kini semakin tampak. Harga kebutuhan pokok mulai merambat naik. Minyak tanah di berbagai tempat mulai langka. Angka pengangguran tinggi. Kurs rupiah melemah. Tak hanya buruh, banyak pengusaha yang juga mulai menjerit.

Saat ini adalah ujian terberat bagi leadership SBY-JK. Jika tahap ini bisa dilewati, sangat mungkin SBY-JK justru menjelma menjadi pemimpin yang sangat kuat dan berwibawa. Semua tergantung pada kondisi ekonomi. *

Menjaga SBY-JK

Apa yang terjadi jika SBY-JK pecah kongsi dan jalan sendiri-sendiri? Inilah pertanyaan paling panas yang kini sedang menjadi buah bibir komunitas politik. Yang jelas, keduanya tidak bisa dipecah oleh MPR hanya karena pecah kongsi. Namun sudah hampir pasti pemerintahan yang ada tidak akan berjalan efektif. Kita segera memasuki kondisi Negara yang gagal. Kian hari kehidupan public kian terpuruk secara politik dan ekonomi.

Jika SBY-JK pecah kongsi, DPR dan MPR segera bergolak dan memainkan kartu truf masing-masing. Isu besar yang ada menjadi semakin besar. Kesepakatan RI-Aceh dipersoalkan kembali. Isu kenaikan BBM dijadikan amunisi membakar kemarahan public luas. Pengangguran yang kritis akan terus diangkat. Partai politik, purnawirawan, politisi, pengusaha, pengamat, mahasiswa, LSM, buruh, dan para ibu rumah tangga segera mengambil jurusnya masing-masing. Politik nasional gunjang-ganjing. Tidak ada yang untung kecuali spekulan politik.

Belakangan ini ada banyak fenomena yang membuat komunitas politik bergunjing mengenai hubungan dua tokoh itu. JK tidak hadir dalam banyak sesi rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh SBY melalui telekonferensi dari AS. Mengapa SBY perlu melakukan serial rapat cabinet ketika ada wakil presiden di dalam negeri? Aneka spekulasi merebak.

Sebelumnya, SBY menyatakan akan mengevaluasi kabinetnya yang terbukti tidak bisa kerja sama. Pernyataan SBY segera memberikan kesan akan ada reshuffle kabinet. Namun kemudian JK membuat pernyataan bahwa tidak ada reshuffle kabinet. SBY menyatakan akan menaikkan BBM setelah kompensasi terbukti jalan. Ketika proses data kemiskinan sendiri belum rapih, JK membuat pernyataan bahwa BBM akan naik tanggal 1 Oktober.

Idealnya, jika Negara Indonesia adalah mobil, JK adalah gas dan SBY adalah rem. Karakter JK memang seperti gas: mendorong “mobil Indonesia” untuk bertindak cepat agar tidak terjadi akumulasi persoalan yang tidak selesai. Karakter SBY seperti rem: menajga “mobil Indonesia” tidak mengebut melanggar rambu-rambu, serta tidak tabrak sana dan tabrak sini. Jika dua tokoh ini bersatu dan harmoni, “mobil Indonesia” akan berjalan seimbang, cepat namun tertib.

Lingkaran terdekat dan elit politik yang tidak ingin Indonesia menjadi Negara gagal memang harus menjaga hubungan dua tokoh ini, SBY-JK. Berbeda dengan wapres era Soeharto, JK adalah wapres yang dipilih langsung dan pemimpin partai terbesar. Secara ketatanegaraan, SBY punya otoritas paling besar karena ia yang menjadi presiden. Namun dalam riil politik, pengaruh JK tidak kalah besarnya karena ia yang dapat “menjinakkan” parlemen dan memobilisasi pengusaha.

Dua tokoh ini dapat belajar dari alam. Bahwa hanya ada satu matahari dan satu bulan bagi bumi. Memang tidak boleh ada matahari kembar. *

Kontak Pandora BBM

Kepastian naiknya harga BBM tanggal 1 Oktober seperti terbukanya kotak Pandora dalam mitologi Yunani. Berbagai hal yang menggelisahkan dalam politik praktis akan keluar dari kotak Pandora itu. Gelombang keresahan publik luas dan demonstrasi segera pecah di berbagai wilayah.

Persoalannya, akankah gelombang kemarahan public itu hanya gejala sesaat saja. Setelah satu bulan, sebagai misal, kemarahan public itu redup kembali. Ataukah sebaliknya. Gelombang kemarahan public akan mengulangi peristiwa 1998. Ujungnya adalah pergantian kekuasaan.

Pemerintah dan oposisi mempunyai perspektif dan harapan yang berbeda mengenai efek politik kenaikan BBM. Pemerintah berharap kenaikan BBM itu seperti pil pahit. Jangka pendek, pil itu terasa menyakitkan. Namun jangka panjang, pil itu ternyata obat yang menyetankan.

Pemerintah memahami akan ada gelombang penolakan yang besar. Tidak terhindari kehidupan public luas kelas menengah ke bawah akan semakin sulit. Harga kebutuhan pokok naik. Namun dalam perspektif pemerintah, akibat naiknya harga BBM, anggaran pemerintah semakin sehat. Diharapkan pada akhirnya anggaran yang semakin sehat itu dapat mensejahterakan rakyat. Ibarat film, kenaikan BBM itu berawal dengan adegan tragedi tetapi happy ending.

Sebaliknya, oposisi berharap efek politik BBM itu memberi pelajaran kepada pemerintah. naiknya harga BBM dianggap pertanda tidak sensitifnya pemerintah terhadap penderitaan rakyat. Janji perubahan yang dihembuskan di masa kampanye, bagi sebagian rakyat ternyata perubahan menuju kehidupan yang lebih susah. Rakyat banyak kini menjadi rumput kering yang siap dibakar.

Berbeda dengan kenaikan harga BBM di awal pemerintahan SBY-JK, saat ini kondisi lebih riskan. Isu BBM segera bersinergi dengan kekecewaan purnawirawan mengenai MOU RI-GAM. Bersatu pula dengan kemarahan sebagian elit akibat tertundanya pengangkatan panglima TNI yang baru. Ditambah pula oleh insentif reshuffle kabinet yang membuat sebagian partai ingin ikut bermain.

Kekuatan oposisi mudah sekali menggabungkan berbagai segmen yang luas akibat bersatunya aneka isu. Apalagi kini, pentolan tokoh kritis sudah mulai pula menyatu: Megawati, Gus Dur, Akbar Tandjung, Wiranto dan Try Sutrisno. Tokoh ini juga sudah resmi menyatakan menolak BBM. Publik luas yang kecewa boleh jadi mendaulat lima sekawan itu untuk memimpin gerakan perubahan.

Sangat mungkin kuartal terakhir tahun ini akan semarak dengan gunjang-ganjing politik. Namun awal tahun 2006 kita harap politik Indonesia berseri kembali. Gunjang-ganjing

politik semoga tidak terlalu lama karena negara ini tidak boleh ambruk. *

Berani atau Nekat ?

Apakah pemerintah telah mengambil keputusan yang berani atau nekat? Ini pertanyaan yang kini menempati urutan pertama “tangga lagu” isu politik masa kini setelah diumumkannya harga BBM. Disebut keputusan berani jika kebijakan itu tidak populer tetapi menyehatkan dalam jangka panjang secara ekonomi dan efek politiknya masih bisa ditanggung. Disebut nekat, jika efek politik kebijakan itu akan melampaui daya tahan pemerintah sendiri.

Perdebatan BBM sudah tidak lagi pada tataran apakah BBM itu perlu naik atau tidak. Perdebatan itu bahkan tidak lagi pada masalah waktu kenaikan karena sudah diputuskan kenaikan itu dilakukan tanggal 1 Oktober 2005. Yang tersisa kemudian hanya masalah prosentase saja. Jika BBM naik, seberapa besar kenaikan yang pas. Harga baru diharapkan bukan saja dapat mengurangi beban anggaran negara, tetapi juga masih dalam batas toleransi psikologi publik luas.

Sebagian pakar, apalagi publik luas, mungkin terkaget-kaget. Ternyata prosentase kenaikan itu sangat besar. Untuk minyak tanah, yang merupakan konsumsi mayoritas kelas menengah ke bawah, persentase kenaikan itu sampai 185%. Seberapa kuat mayoritas masyarakat miskin mampu menanggung tingginya prosentase kenaikan minyak tanah? Ini keputusan berani atau nekat?

Tidak lama setelah pengumuman kenaikan harga BBM, beredar SMS di kalangan public luas. SMS ini jenis provokasi politik yang mengajak mengkokok ulang pemimpin Negara. Target oposisi kini bukan lagi ingin mengkokok ulang cabinet. Pemimpin nasional sudah pula menjadi sasaran. Ke depan, kita akan sering mendapatkan SMS serupa. Seberapa besar pengaruh SMS itu untuk ikut memanaskan situasi menuju gunjang-ganjing politik?

Kita dapat menilai keputusan BBM itu mungkin empat tahun dari sekarang, sebelum dimulai kembali pemilu 2009. Jika saat itu ekonomi tumbuh, rakyat semakin sejahtera, kita pun mengenang kenaikan BBM saat ini dengan senyum. Para pengamat, politisi, dan ekonom, segera berkomentar betapa pada tanggal 1 Oktober 2005, pemerintah telah membuat keputusan yang berani. Berbagai penghargaan diberikan kepada SBY-JK atas kualitas leadership-nya.

Namun jika empat tahun dari sekarang, politik selalu tidak stabil, goro-goro selalu terjadi, dan menyebabkan ekonomi semakin merosot, penilaian sebaliknya yang diberikan. Pemerintah dianggap terlalu nekat menaikkan harga BBM di atas ambang toleransi psikologi publik luas. Akibatnya semua scenario ekonomi yang baik tidak berjalan karena terganggu oleh goro-goro politik. Saat itu semua pihak akan menilai keputusan kenaikan BBM 1 Oktober 2005 sbbagai kebijakan yang nekat. Bukan kenaikan BBMnya yang nekat tetapi presentasenya. waktu yang akan menilai dan menjadi hakimnya. *

Obor Oposisi

Buruh, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha, mulai merasakan efek kejut dari naiknya harga BBM. Level ketidakpuasan atas situasi saat ini semakin tinggi. Pengamat politik dan ekonomi yang vocal semakin kritis dan potensial memprovokasi situasi.

Akankah kegelisahan yang kini meluas di tengah masyarakat berujung pada terbentuknya sebuah oposisi politik yang kuat dan bersatu? Oposisi itu, misalnya, tidak hanya mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari public luas yang kecewa, namun juga mampu memaksakan sebuah perubahan?

Ataukah kegelisahan yang ada hanya berhenti sebagai ekspresi kemarahan yang sifatnya sangat sporadic? Kegelisahan itu, misalnya, hanya berujung pada letupan aksi protes yang tidak signifikan, terbentuknya pos-pos politik yang longgar, atau aneka pernyataan sikap yang kritis namun kemudian diabaikan?

Referensi gerakan oposisi yang legendaries adalah peristiwa tahun 1998. secara gradual saat itu, semua kegelisahan yang ada berujung pada pemberian mandat tidak resmi kepadasatu figure besar: Amien Rais. Secara perlahan, tetapi pasti, oposisi bersatu dan menyerahkan obor itu kepada satu "imam". Kelompok politik lain yang tidak secara langsung berdiri di belakang Amien Rais melakukan gerakan yang satu nada, sehingga memperkuat oposisi.

Saat itu, parlemen menjadi stempel Pemerintah. loyalitas parlemen terhadap Pak Harto melampaui loyalitas parlemen saat ini kepada SBY-JK. Bahkan ketua parlemen saat itu adalah Harmoko. Ia politisi sekaligus ketua umum partai terbesar yang meminta Pak harto bersedia menjadi presiden kembali. Namun meluasnya ketidakpuasan masyarakat merubah orientasi politik parlemen. Justru Harmoko yang akhirnya menjadi pejabat publik pertama yang meminta Soeharto untuk mundur.

Target oposisi saat itu juga bukannya sekedar pergantian kekuasaan belaka, tetapi perubahan sistem. Setelah tahun 1998, politik Indonesia berubah menajdi politik demokrasi. Hak berorganisasi dan beropini, pemilu bebas dan langsung merubah wajah politik Indonesia. Oposisi di tahun 1998 menjadi contoh oposisi modern yang berpengaruh.

Bagaimana situasi saat ini? Kondisinya masih fifty fifty. Sumber ketidakpuasan memang sudah tersedia akibat terlalu drastisnya kenaikan harga BBM. Saat ini, gerakan mahasiswa semakin berkonsolidasi. Pers juga semakin kritis. Ibu rumah tangga semakin banyak yang mengeluh. Pengusaha banyak yang menjerit. Yang belum ada memang entrepreneur politik sekelas Amien Rais di tahun 1998.

Setelah lebaran, di bulan November 2005, wujud politik oposisi semakin jelas. Seandainya oposisi itu bangkit kembali, kita harap ia lebih banyak membawa manfaat, bukan mudharat.*

Wacana Impeachment

Belum setahun usia pemerintahan SBY-JK. Namun wacana impeachment atau pemecatan presiden sudah mulai merebak. Wacana ini segera menjadi panggung besar bagi para pemain politik. Berbagai jurus maneuver mulai dipersiapkan. Ada pemain yang mulai bicara terang-terangan . ada yang baru mengendap-ngendap memprovokasi kondisi. Ada pula yang masih wait and see, membaca perkembangan. namun semua siap menerkam presiden ketika situasi sudah matang.

Awalnya isu itu dipopulerkan oleh sekelompok politisi dan purnawirawan yang kecewa dengan perundingan RI-GAM soal Aceh. Belum reda kasus Aceh, kini isu impeachment kembali diusung untuk kasus BBM.

Pemicunya adalah surat mahkamah konstitusi. Secara terbuka, mahkamah konstitusi mengoreksi basis hukum yang dijadikan Perpres untuk menaikkan harga BBM. Prinsip menyesuaikan harga BBM kepada mekanisme pasar yang ada

pada UU No 22 tahun 2001 tentang Migas sudah dicabut melalui Judicial Review.

Koreksi mahkamah konstitusi awalnya hal yang biasa dan datar saja. namun surat itu segera “digoreng” dan dibelokkan oleh para pemain politik seolah sudah terjadi pelanggaran konstitusi dalam kenaikan harga BBM.

Gelombang baru penolakan kenaikan BBM segera mendapatkan obat doping. Sekelompok mahasiswa dan kaum muda mendatangi mahkamah Agung meminta pembatalan Perpres yang menaikkan harga BBM. Segera pula beredar undangan buka puasa bersama di sepanjang jalan Istana Negara untuk menolak BBM pada tanggal 20 Oktober 2005.

Apa target wacana impeachment? Motivasi tentu beragam. Hubungan presiden dan wapres ingin diganggu oleh isu impeachment itu. Seolah wapres akan mendapatkan keuntungan jika presiden dipecat. Otomatis wapres menjadi presiden seperti Habibie menggantikan Soeharto atau Megawati menggantikan Gus Dur.

Namun jika impeachment menimpa presiden dan wakil presiden sekaligus, yang diuntungkan adalah pasangan calon presiden lain. Berdasarkan konstitusi yang sudah diamandemen, MPR akhirnya akan memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden lain yang memiliki dukungan terbanyak pada pemilu lalu.

Kaum democrat mempunyai sikap yang berbeda terhadap impeachment. sekeras apapun kemarahannya atas situasi saat ini, sejauh tidak ada pelanggaran hukum yang ekstrem dari presiden, seorang democrat sabar menunggu siklus pergantian pimpinan lima tahun sekali. Sebuah negeri akan ambruk jika terlalu mudah mengganti-ganti pimpinan nasional di tengah jalan.

Jika kecewa dengan kondisi saat ini, para democrat tentu dibolehkan bahkan diwajibkan melakukan control dan oposisi atas presiden. Namun oposisi itu dibatasi pada tuntutan perubahan kebijakan atau kementrian saja. Wacana impeachment terlalu mahal ongkos politiknya.*

Setahun SBY-JK

Public punya impiannya sendiri mengenai pemimpin nasional. Hasil survey menunjukkan yang diinginkan adalah presiden sebagai strong leader yang membawa perbaikan ekonomi. Public ingin Pemerintahan sekarang seperti Orde Baru tetapi untuk versi yang demokratis. Di era Orde baru, memang pertumbuhan ekonomi tinggi dan kewibawaan pemimpin nasional sangat terasa.

Impian public itu memang belum tercapai di tahun pertama Pemerintahan SBY-JK. Berdasarkan riset nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI), mayoritas public (57%) justru merasa ekonomi saat ini buruk. Citra strong leader yang diimpikan belum pula terealisasi.

Banyak hal yang menjadi penyebab. Ada unsur bad luck. Sejak SBY-JK memerintah, berbagai bencana di luar control SBY-JK menimpa. Mulai dari bencana alam, bencana penyakit, bencana minyak bumi global yang sangat mempengaruhi daya

tahan ekonomi nasional. ada pula unsur kelembagaan politik sebagai penyebabnya. Presiden dipilih langsung dalam sistem multipartai. SBY terpilih namun berasal dari partai kecil. Demi menjaga dukungan di parlemen, presiden melakukan kompromi dan negosiasi dengan aneka bos dan pemimpin partai besar.

Namun kapabilitas pemerintahan sendiri juga menjadi penyebabnya. perbedaan gaya leadership antara SBY-JK, lemahnya koordinasi kementerian, inkompetensi beberapa menteri dan kecurigaan adanya conflict of interest tokoh Pemerintahan, ikut membuat situasi setahun SBY-JK bermasalah.

Yang menggembirakan, berdasarkan hasil survey LSI itu, public masih menaruh harapan besar pada SBY. Public percaya pada personality SBY walau kecewa dengan kinerjanya. Public percaya bahwa SBY bekerja keras, jujur, berpihak kepada kepentingan rakyat. Kepercayaan public yang masih tinggi itu akan berbuah jika SBY didukung oleh tim yang kuat.

Tahun kedua menjadi momentum SBY memiliki team yang kuat. Asset politik termahal SBY adalah JK sendiri, yang mendampinginya sebagai wakil presiden. JK bukan politisi biasa. Kelas JK sudah setingkat innovator, tokoh yang berani mengambil kebijakan penting dan beresiko, tetapi dengan kalkulasi rasional.

Namun ditahun kedua, JK harus berperan seperti Dick Cheney bagi George Bush. Di tahun pertama, Dick Cheney dikritik telah berperan sebagai the acting president atau the real prime minister. Setelah itu, Dick Cheney lebih berperan di belakang saja dan menumbuhkan kesan bahwa memang George Bush yang memegang kendali pemerintahan selaku presiden.

Reshuffle cabinet untuk posisi kunci penting pula dilakukan. Kocok ulang menteri itu menjadi penanda bahwa presiden serius memperbaiki kelemahan pemerintahannya di tahun kedua.*

SBY atau JK

Peran siapa yang lebih menonjol dalam mengendalikan Pemerintahan selama ini, SBY atau JK atau sama saja? Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menanyakan hal itu kepada responden sebagai sampel dari seluruh populasi di seluruh propinsi Indonesia, di awal Oktober 2005.

Jawabannya sangat mengejutkan. Yang menyatakan SBY lebih menonjol hanya 43%. Untuk soal ekonomi, jawabannya lebih mengejutkan lagi. Yang menyatakan SBY lebih berperan malah merosot ke angka 33,8%. Sedangkan yang menyatakan peran mereka sama saja atau bahkan JK lebih berperan meningkat ke angka 56,2%.

Temuan ini pasti tidak menyenangkan banyak pihak. SBY selaku presiden tentu tidak nyaman dengan persepsi bahwa ia kurang berperan dibandingkan yang seharusnya. JK selaku wakil presiden pasti gerah pula jika dianggap “menempong” presiden. Pakar tata negara, professional dan pengamat juga merasa

ganjil. Bagaimana mungkin dalam sistem presidensialisme, ketika presiden dipilih langsung, peran SBY justru dianggap kurang menonjol.

Yang paling tidak nyaman tentu 150 juta pemilih dari Aceh sampai Papua. Di tahun 2004, mereka yang menobatkan SBY sebagai presiden dan JK sebagai wakil presiden. Setahun kemudian, mereka melihat SBY kurang maksimal mendayagunakan semua kapasitas dan fasilitas politik yang disediakan oleh sistem presidensialisme.

Persepsi public itu tercipta begitu saja. SBY - JK tidak berencana menciptakan kesan itu. Namun proses politik dan ekonomi selama setahun SBY-JK sudah menjadi panggung. Public selaku penonton menilainya dengan jujur.

Tiga hal yang mempengaruhi penilaian public. Pertama, impresi selama setahun SBY-JK. Dua isu paling menonjol selama setahun ini adalah kenaikan BBM dan perundingan RI-GAM soal Aceh. Dalam kedua peristiwa itu, JK tampak lebih berinisiatif dan berperan. Kedua, perbedaan gaya leadership SBY dan JK. Jika diperbandingkan, JK memang tampak lebih agresif, lebih cepat dan tegas. Gaya JK terkesan sebagai seorang inisiator, pengambil inisiatif.

Ketiga, impresi dalam politik elit. Karena JK ketua umum partai terbesar dan terkesan selama ini ia menjadi pengendali utama parlemen, JK terkesan lebih dominan. Berbagai isu yang bergaung di kalangan elit mengenai matahari kembar dan dualisme kepemimpinan ternyata sudah mengakar di persepsi orang awam, dari Aceh sampai Papua.

Menjaga Indonesia saat ini adalah menjaga hubungan SBY-JK. Di tahun kedua, JK tetap saja harus berperan sebagai solusi masalah bangsa. Namun ia harus lebih low profile, lebih bermain di belakang layar dan mengurangi pernyataan public. Sebaliknya, SBY harus menunjukkan bahwa dirinya lah yang

menjadi presiden. Isu reshuffle cabinet akan menjadi test case pertama dua tokoh ini di tahun kedua Pemerintahan. *

Politik Orang Miskin

Berulang-ulang Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan riset terhadap seluruh populasi Indonesia, dari Aceh hingga Papua, melalui sistem sampel. Apa yang menjadi perhatian utama dan prioritas mereka selaku warga Negara ? lebih dari 60% menjawab yang mereka utamakan adalah masalah ekonomi.

Membumbungnya harga kebutuhan pokok menjadi keprihatinan mereka yang utama. Semakin harga membung, semakin berat mereka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kesulitan mencari pekerjaan menjadi keprihatinan mereka berikutnya. Tanpa kerja, mereka tidak punya pendapatan untuk mempertahankan hidup yang sederhana sekalipun.

Justru untuk dua kebutuhan itu, kondisi nasional saat ini bermasalah. Inflasi melambung tinggi sekali, yang tertinggi setelah krisis ekonomi 1998. Sementara presentase angka pengangguran juga tinggi. Gabungan presentase inflasi dan

presentase pengangguran disebut misery index. ini menjadi alat ukur untuk mengetahui level ketidakpuasan public di akar rumput.

Seorang teman ekonom mencoba memperbandingkan misery index ketika Gus Dur jatuh dari kursi kepresidenan. Ternyata misery index saat itu lebih kecil ketimbang misery index saat ini. Dengan kata lain, situasi saat ini sebenarnya justru lebih berbahaya dilihat dari potensi kemarahan rakyat di akar rumput. Bedanya, di era Gus Dur oposisi sangat kuat. Sementara saat ini, oposisi masih malu-malu. Pemerintahan SBY-JK masih selamat.

Memang untuk kinerja di luar ekonomi, Pemerintahan SBY-JK cukup menggairahkan. Gebrakan korupsi cukup terasa sebagai awal. Pilkada berlangsung di sekitar 200 wilayah dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya. Aceh dan Papua pelan-pelan diselesaikan. Namun jika rakyat banyak merasa ekonomi mereka semakin susah, pencapaian non-ekonomi itu tenggelam.

Siapun yang mencintai NKRI tidak ingin Presiden sekarang gagal. Jika gagal, yang akan dirugikan bukan saja faksi politik presiden, atau koalisi Pemerintahan. Yang dirugikan adalah seluruh momentum untuk membuat NKRI lebih terkonsolidasi dalam demokrasi dan kesejahteraan. Apalagi, dilihat dari kapabilitas dan integritas dan akseptabilitas, sebenarnya SBY-JK punya semua kualifikasi untuk berhasil.

Tahun kedua Pemerintahan, semoga dua tokoh ini semakin memprioritaskan ekonomi. Presiden dan wakil presiden harus lebih menegaskan platform ekonominya. Ibarat menjadi dirigen sebuah orchestra, keseluruhan musisi harus tahu lagu apa yang akan dimainkan. Para musisi harus pula kompak bermain dalam satu team.

Platform ekonomi dan kekompakan team ekonomi presiden itu yang justru menjadi titik lemah tahun pertama SBY-JK.

Semoga di tahun kedua, kelemahan ini tertutupi, baik dengan cara reshuffle kabinet ataupun tetap dengan menteri lama.*

Pemerintahan di Simpang Jalan

Setelah melewati jalan yang berliku di tahun pertama, memasuki tahun kedua, pemerintahan SBY-JK kini tepat berada di simpang jalan. Ke arah kanan adalah jalan menuju scenario baik. Ke arah kiri menuju scenario buruk. Ibarat lagu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Saat ini kemungkinannya masih fifty-fifty.

Pemerintahan SBY-JK masih punya potensi menjadi sangat sukses. Dua tokoh itu, SBY-JK, masih berpeluang dikenang sejarah sebagai the great leaders. Ini terjadi jika selama empat tahun ke depan terjadi perubahan yang fenomenal. Perekonomian tumbuh pesat. Kesejahteraan masyarakat meningkat secara mencolok. Pemerintahan menjadi bersih. Pejabat publik terkena efek jera KKN.

Partai politik perlahan tumbuh dan mengalami pelembagaan yang kuat. Di tahun 2009, bahkan ada satu partai politik yang perolehannya di atas 30%, atau 40%. SBY-JK dicatat sejarah

telah menjadi innovator yang meletakkan fondasi politik dan ekonomi Indonesia modern dan kokoh.

Sebaliknya, Pemerintahan SBY-JK mungkin pula mengalami pelemahan. Ini terjadi jika ekonomi tidak kunjung bangkit. Kehidupan rakyat terasa semakin susah. Harga terus melambung tinggi. Pengangguran meningkat. Sementara investasi tidak kunjung datang.

Kerapuhan ekonomi segera menyulut fragmentasi politik yang semakin tajam. Politik semakin terpecah belah. Kesulitan ekonomi dan kekecewaan public atas Pemerintahan membuat elit partai semakin bermanuver. Akibatnya aneka partai semakin diramaikan oleh konflik internal elit. Polarisasi antara mendukung Pemerintah dan beroposisi terjadi di setiap partai.

Pemberantasan korupsi semakin hari semakin redup. Para aneka koruptor besar ikut bermain membuat situasi semakin gunjang-ganjing. Sementara aktivis LSM, gerakan mahasiswa, para opinion makers semakin membuat polarisasi politik tajam dan panas. Pemerintahan SBY-JK terus digoyang sampai di akhir masa jabatannya.

Scenario mana yang akan menimpa Pemerintahan SBY-JK. Tidak bisa dipungkiri, lapangan politik dan ekonomi Indonesia saat ini sangat sulit. Bahkan presiden atau perdana menteri kelas dunia, jika dibajak, disewa untuk memerintah Indonesia, mungkin mereka juga akan gagal. Indonesia saat ini memang masih mengalami krisis multidimensi.

Beratnya situasi Indonesia memang tidak bisa diatasi oleh politisi atau pejabat Pemerintah kelas biasa. Kita butuh pemimpin yang kuat, inovatif, cepat dan berani mengambil keputusan demi kemajuan bangsanya. Kualitas leadership itu yang menentukan. Publik dapat menilai keduanya dari berbagai kasus, mulai dari BBM sampai kini, isu reshuffle cabinet.

Semoga SBY-JK berada dalam kualifikasi itu. Jika tidak, kasihan nasib rakyat.*

JK : Man Of The Year 2005 ?

Jika ada pemilihan Man of the Year Indonesia 2005 mungkin JK (Jusuf Kalla) berhak menyandanginya. Sepanjang tahun 2005, ia mengambil resiko bagi persoalan politik yang pelik. Keputusan sulit diambil. Pro dan kontra, kontroversi dan aneka masalah lain diurus belakangan. Namun fakta menunjukkan JK mampu merubah wajah politik secara mendasar.

Manuver Jusuf Kalla mutakhir adalah soal Papua dan Irian Jaya Barat. berulang-ulang pilkada di Irian Jaya Barat diulur. Berulang-ulang pemimpin Papua mengancam mengembalikan otonomi khusus. Tokoh yang baru saja dilantik sebagai pimpinan Majelis Rakyat Papua juga mengancam akan mengembalikan jabatannya.

Jusuf Kalla bersama jajarannya menggelar dua kali pertemuan. Kesepakatan tercapai. Berbagai pihak yang berpengaruh di Papua dan Irian Jaya menerima solusi itu. MRP merasa dihormati. Prinsip otonomi khusus dijalankan. Sementara Irian Jaya sebagai propinsi tetap dijamin eksis beserta pilkadanya.

Sebelum Papua, Aceh turut pula diselesaikan oleh JK. Lebih rumit dibandingkan Papua, pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka sudah berurat-akar. Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Megawati gagal menyelesaikan Aceh.

Dengan cepat JK bertindak. Melawan semua arus dan kontroversi, kesepakatan diambil. Lahirlah MOU Helsinki yang fenomenal. Kini rakyat Aceh merasa hidup lebih nyaman. Jika MOU itu bisa terus mengejawantah di bawah NKRI dan UUD 45, JK turut menciptakan sejarah baru di Aceh, yang tidak hanya merubah wajah Aceh, tetapi juga politik nasional.

Sebelum Aceh, partai Golkar menjadi sasaran. Walau terpilih secara langsung mendampingi SBY, dukungan politik parlemen susah didapatkan. Saat itu, parlemen didominasi oleh koalisi kebangsaan, dengan pentolan dua partai besar: PDIP dan Golkar. Pengaruh Akbar Tandjung sangat besar sebagai ketua umum Golkar. Pemerintahan SBY-JK terkesan segera menjadi tawanan parlemen.

Situasi berbalik. Dengan penuh determinasi sebulan sebelum pemilihan, JK dan teamnya beresiko merebut posisi ketua umum. Aneka pro-kontra dan kontroversi tidak ia pedulikan. Hasilnya bukan saja posisi ketua umum mampu direbut. Namun JK berhasil pula merubah politik parlemen dari kekuatan oposisi menjadi pendukung Pemerintahan.

Memang tidak semua inovasi JK mendapatkan pujian. Peran JK untuk ikut menaikkan harga BBM dengan rata-rata di atas 100% dianggap ikut menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Bukan kenaikan BBM itu yang menjadi sorotan, tetapi presentase kenaikan yang dianggap terlalu dramatis. JK juga dianggap terlalu dominan sebagai wakil presiden.

Namun fakta memang menunjukkan, sepanjang tahun 2005, manuver JK merubah wajah politik secara signifikan. Selamat kepada JK, Man of The Year 2005.*

Kembalinya Pesona SBY

Diumumkannya nama baru dalam team ekonomi presiden memiliki efek psikologis yang besar. Bukan saja pasar bereaksi positif dengan indicator meningkatnya pergerakan harga saham. Bukan saja masyarakat politik merasa presiden merespon tuntutan masyarakat yang terhimpit dengan aneka kesulitan ekonomi. Yang terpenting, public menemukan kembali pesona leadership SBY yang dirasakan memudar di tahun pertama pemerintahan.

Sebelum SBY dilantik, harapan masyarakat kepada SBY sangat melambung. Tingkat kepercayaan public atasnya tinggi sekali, mencapai angka sekitar 80%. publik merasa SBY memiliki semua kualifikasi untuk menjadi tidak hanya presiden yang sukses tetapi the great leader. Saat itu, ia dianggap memiliki kapabilitas, integritas dan akseptabilitas sekaligus, yang jarang dimiliki pemimpin lain.

Setahun setelah memerintah, pesona leadership SBY memudar. Survey yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Oktober 2005, menunjukkan tingkat popularitasnya merosot ke angka 52%. Inilah tingkat popularitas SBY paling rendah sepanjang tahun, dan di bawah dukungan yang diterimanya ketika pemilu presiden tahap kedua.

Dua hal yang membuat pesona SBY memudar. Pertama, public merasa kehidupan ekonomi bertambah sulit. Apalagi setelah BBM naik kedua kalinya, dengan presentase kenaikan yang tidak tanggung-tanggung, rata-rata di atas 100%. Inflasi akibatnya melambung ke angka paling tinggi setelah krisis ekonomi 1998. Misery index, gabungan antara presentase inflasi dan pengangguran, melampaui misery index ketika Gus Dur dijatuhkan sebagai presiden.

Kedua, presiden dianggap tidak mengontrol roda ekonomi nasional. atau muncul spekulasi bahwa team ekonomi presiden memang tidak bertanggung jawab kepada presiden. Bahkan banyak pula yang bertaruh apakah presiden “berani” mengganti menteri tertentu. Sekali lagi ini adalah persepsi yang belum tentu faktanya memang demikian. Tetapi opini public memang dipengaruhi oleh persepsi, bukan fakta.

Public memang tidak meragukan integritas SBY. Namun yang jauh merosot adalah tingkat kewibawaan presiden akibat persepsi bahwa SBY kurang decisive, kurang determinat, kurang “berani mengambil resiko” untuk mengangkat kehidupan rakyat.

Kini SBY memiliki momentum untuk kembali tampil dengan pesonanya yang dulu. Sejak dulu sampai sekarang, yang diinginkan public memang pemimpin yang kuat, yang menumbuhkan ekonomi. Clinton, ketika menjabat presiden AS, pernah pula diragukan leadershipnya. Namun Clinton cepat merubah pola leadershipnya dan kemudian dijuluki the

comeback kid. Jika konsisten dengan determinasinya, SBY layak pula mendapatkan ucapan selamat: welcome back.*

Politik Lima Sekawan

Para politisi senior, yang kita sebut saja lima sekawan, kembali berkumpul. Megawati Soekarnoputri, Gus Dur, Akbar Tandjung, Wiranto, dan Try Soetrisno kembali membuat pernyataan politik. Mereka berlima masih menjadi magnet perhatian public. Media massa masih memuat sepak terjang mereka sebagai berita utama.

Memang ada yang kosong dalam bangunan politik Indonesia saat ini. Pemerintah bergerak nyaris tanpa oposisi yang berarti. DPR yang diharapkan memainkan peran itu melempem. Aneka partai politik yang diharapkan vocal lebih banyak maju mundur dalam rangka diakomodasi kekuasaan. Hanya PDIP yang relatif konsisten dengan sikapnya.

Ruang kosong ini yang diisi oleh politisi lima sekawan. Persoalannya sekarang, seberapa jauh lima sekawan itu mampu mengkapitalisasi kebutuhan public akan oposisi? Dan seberapa

jauh pula mereka mampu menampilkan diri tepat seperti yang diidam-idamkan rakyat banyak?

Lingkarannya Survei Indonesia (LSI) melakukan riset mengenai lima sekawan itu berhadapan-hadapan dengan Pemerintah saat ini. Public ditanya mengenai siapa yang lebih mereka dukung jika SBY berhadapan-hadapan dengan lima sekawan: Megawati, Gus Dur, Akbar, Wiranto dan Try. Siapa yang lebih didengar dan diikuti public.

Jawabannya sangat menarik. Secara umum, public memang masih berada di belakang SBY. Namun untuk isu tertentu, seperti penentangan atas kenaikan harga BBM yang drastis, public berada di belakang lima sekawan dan meninggalkan SBY. Apa artinya? Isu menentukan. Isu yang membuat lima sekawan ini didukung atau ditinggalkan public.

Ke depan, lima sekawan ini harus pandai-pandai memilih isu. Mereka juga jangan segan-segan malah mendukung Pemerintah untuk isu tertentu. Jangan selalu tampil dengan menentang Pemerintah. kadang perlu juga tampil justru menyuarakan public membela Pemerintah. semua tergantung pada isu.

Dengan kecerdasan politik itu, niscaya lima sekawan akan naik kelasnya menjadi kumpulan para negarawan. Inilah makom yang paling pas untuk mereka. Apalagi dilihat dari pencapaian karir, mereka semua sudah sampai puncak. Gus Dur dan Megawati pernah menjadi presiden. Akbar Tanjung pernah menjadi ketua DPR. Try Soetrisno pernah menjadi wakil presiden. Wiranto pernah menjadi Pangab.

Tidak ada lagi jabatan karir lebih tinggi yang dapat mereka raih. Satu-satunya yang tersedia adalah kelas sebagai negarawan. Di saat Negara Indonesia memiliki terlalu banyak politisi, justru status negarawan itu yang mahal harganya. Sebagai negarawan, kepentingan mereka bukan lagi menjatuhkan SBY

atau mengeritik pemerintah. Tujuan mereka jauh lebih mulia seperti menjaga kualitas demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

Setelah reformasi berusia 9 tahun, betapa kita mulai jenuh dengan acrobat politisi dan merindukan kearifan negarawan.*

Tritunggal 2005: SBY, JK, Sutanto

Siapakah tokoh yang paling mempengaruhi ruang public sepanjang tahun 2005? Jawabnya tritunggal SBY, JK, Sutanto.

SBY paling tepat diberi label sebagai The Man of Integrity 2005. Sepanjang tahun, integritas SBY sebagai pemimpin semakin dirasakan. Ia memang banyak dikritik soal ketegasannya sebagai leader. Namun hampir semua sepakat, bahwa tidak ada kritik, problem, atau rumor menyangkut integritasnya. Tidak ada cerita, misalnya soal KKN, money politics atau pat gulipat keuangan Negara yang melibatkan SBY.

SBY dianggap sebagai the untouchable, tidak tersentuh oleh mafia keuangan yang selama ini mendominasi politik dan ekonomi Indonesia. Ia sudah menandatangani begitu banyak izin untuk memeriksa kasus korupsi pejabat Negara. “ikan besar” kasus korupsi sudah pula ditangkap dan tengah diadili.

Tentu masih ada kekurangan di sana-sini dalam perang melawan korupsi itu. Tetapi sebagai gebrakan awal, inisiatif SBY sangat berharga. Jika kebijakan ini dikerjakan secara konsisten dan berkesinambungan, SBY akan dicatat dengan tinta emas karena memberikan teladan untuk membersihkan monster KKN yang selama ini membuat Indonesia gelap.

JK paling pantas diberi label sebagai The Man of Action sekaligus The Man of The Year 2005. Sepak terjangnya mempengaruhi politik Indonesia dalam cakupan dan dimensi secara paling luas. Ia rebut ketua umum Golkar. Dalam waktu cepat konstelasi politik nasional berubah. Parlemen yang tadinya menjadi oposisi, yang dapat mengobrak-abrik pemerintahan eksekutif, ia ubah justru menjadi pendukung Pemerintahan.

Aceh yang berdarah selama 30 tahun lebih, ia ubah secara substansial. MOU Helsinki membuat rakyat Aceh kini hidup normal. Survey yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di bulan Oktober 2005, membuktikan itu. Mayoritas public Aceh merasa jauh lebih baik dan jauh lebih aman. Jika aura damai Aceh dapat dijaga, sumbangan JK bagi kesatuan NKRI bersifat historis. Hanya untuk kasus Aceh saja, JK bahkan dapat dilabel sebagai Man of Century, salah satu tokoh yang paling mempengaruhi Indonesia selama 100 tahun terakhir.

Sutanto patut diapresiasi sebagai algojo paling berwibawa dalam soal penegakan hukum. Tidak lama setelah dilantik, ia berhasil bukan saja meringkus gembong teroris. Ia juga membongkar salah satu pabrik obat terlarang terbesar. lebih dari itu, ia membuka aib para seniornya sendiri yang selama ini membuat polisi seolah mandul. Jika langkah Sutanto terus konsisten, bukan mustahil dibawah kepemimpinannya akan terbentuk korps polisi ideal yang lama dirindukan.

Semoga SBY, JK, dan Sutanto tetap menjadi tritunggal yang menjadi tulang punggung pemerintahan di tahun 2006 kelak. *

Langkah Historis di Aceh

Dalam jangka waktu satu tahun, banyak peristiwa yang terjadi. Namun hanya ada satu atau dua peristiwa saja yang dapat dikualifikasi sebagai langkah historis. Peristiwa historis untuk ukuran Indonesia saat ini adalah langkah para petinggi GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Menurut rencana, secara resmi para petinggi itu akan membubarkan GAM. Sebagai gantinya, akan dibentuk organisasi baru bernama KPA (Komite Peralihan Aceh).

Jika rencanan itu terlaksana, niscaya ini adalah sebuah revolusi di Aceh. Efek dari peristiwa itu tidak hanya dirasakan oleh Aceh, tetapi juga Indonesia, bahkan dunia. Langkah ini segera menguburkan sejarah 30 tahun konflik panjang Aceh menuju kemerdekaan. Langkah ini segera pula menguburkan keresahan lama ibu pertiwi yang selalu terancam kehilangan “anak kandungnya”, propinsi Aceh. Sedangkan bagi dunia, kasus Aceh segera menjadi percontohan resolusi konflik yang sangat berhasil dalam waktu yang sangat cepat pula.

Lalu apa yang akan diperjuangkan oleh KPA ,selaku reinkarnasi dari GAM?Jelas yang diperjuangkan bukan lagi Aceh Merdeka. Itu point yang paling penting.Tetapi memang masih belum ada kejelasan dan persamaan persepsi mengenai hubungan Aceh dan Induknya, Indonesia kelak.

Sebagian petinggi GAM dan elit Aceh menginginkan konsep self government, seperti hubungan Hongkong dan induknya RRC. Secara konseptual, Hongkong memang masih bagian dari RRC.Namun Hongkong bergerak dengan prinsip ekonomi yang sangat luas sekali. Peran pemerintah pusat RRC atas Hongkong sangat minim. Bahkan struktur ekonomi dan politik Hongkong sangat berbeda dengan induknya. Hongkong dan RRC menganut prinsip satu Negara tetapi dua sistem.

Banyak pula yang berharap Aceh tidak melangkah sejauh itu. Mereka menginginkan Aceh tetap berada dalam status otonomi khusus yang sudah diberlakukan. Bedanya, kini otonomi khusus itu diperluas. Misalnya, Aceh hanya dibolehkan ada partai lokal yang boleh bertarung dalam pilkada.

Jika petinggi GAM sudah membubarkan GAM, tentu mereka juga layak mendapatkan konsensi yang sama substansialnya. Hak mendirikan partai local di Aceh sangat patut dipertimbangkan. Logikanya sederhana, jika kita tidak ingin petinggi GAM berontak secara militer, kita harus memberikannya instrumen politik.

Tidak mungkin petinggi GAM itu dapat berjuang secara politik jika mereka tidak punya partai. Bergabung dengan partai nasional di Aceh memang merupakan satu pilihan. Namun harus juga dibuka peluang mereka mengelola partai lokal sendiri. Walau kita tahu, GAM yang sukses di perjuangan militer, belum tentu juga sukses dalam perjuangan politik. Sejarah baru sedang dibuat di Aceh.*

Heboh Mobil Jaguar

MENGAPA isu atau gossip mengenai mobil jaguar sebagai hadiah kepada lingkaran presiden masih terus berlanjut? Padahal pihak yang dituduh menerima dan pihak yang dituduh memberikan Jaguar sudah membuat klarifikasi. Pihak yang melaporkan kepada KPK juga sudah menjelaskan bahwa ia tidak memiliki bukti dan hanya mendengar gossip. Pihak kepolisian sudah pulamengecek dan tidak menemukan STNK mobil jaguar atas nama tertuduh.

Akar dari masih bertahannya gossip mobil jaguar itu adalah distrust atau ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Negara. Distrust itu punya akar yang panjang. Tanpa mendahului proses penyelidikan, besar kemungkinan isu mobil jaguar itu ttidak benar. Namun distrust atas kebersihan penguasa itu memang tidak dibentukoleh fakta kasus tertentu, tetapi oleh kebiasaan sebelumnya.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) berkali-kali melakukan survey mengenai opini publik atas praktek korupsi penyelenggara negara. Public juga diminta menilai seberapa jauh mempercayai janji anti-korupsi aneka pejabat. Mayoritas public memang cenderung tidak percaya.

Sudah terlanjur terbentuk persepsi bahwa di Indonesia ini tetap berlaku “politics as usual”. Kultur korupsi dianggap tidak akan berubah, siapapun yang berkuasa. Ini sebuah persepsi pesimis yang merugikan namun memang sudah pula teruji kebenarannya. Itu sebabnya, mengapa Indonesia masih dianggap sebagai Negara paling korup di Asia. Setiap kali ada upaya pemberantasan korupsi selalu gagah di awal namun layu kemudian.

Public menilai pula secara rasional bahwa ada jarak yang lebar antara gaji resmi seorang pejabat dengan kebutuhan gaya hidup dan pembinaan jaringan politiknya. Gaji pejabat di Indonesia termasuk yang paling rendah di Asia. Namun sang pejabat butuh dana politik yang besar untuk memelihara dukungan politiknya, dan untuk juga menjaga level gaya hidupnya. Hanya gaji resmi saja dianggap tidak akan mencukupi kebutuhan politik dan gaya hidup itu.

Jika sang pejabat pengusaha, defisit atas kebutuhan itu dapat ditutup oleh profit dari dunia usaha keluarganya. Namun jika sang pejabat bukan pengusaha, dari mana dana itu diperoleh ? kondisi ini dianggap sumber korupsi. Kondisi ini pula yang menyebabkan mengapa korupsi di Indonesia susah diberantas. Yang berubah kemudian hanya teknik kecanggihan dalam pat-gulipat dan ‘pemberian hadiah’.

Lingkaran presiden terkena getahnya. Namun tidak hanya lingkaran presiden, pejabat tinggi lain juga rawan atas prasangka. Secara factual, sangat mungkin isu mobil jaguar itu hanya berita bohong. Namun distrust kepada kebersihan penyelenggara negara butuh waktu yang panjang untuk dipulihkan. *

Beroposisi Soal Impor Beras?

PDIP mencanangkan dengan keras sekali bahwa mereka beroposisi atas kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras. Kebijakan itu dianggap merugikan petani. Tidak ada yang istimewa di sini. Semua mahfum bahwa PDIP memang sudah memilih beroposisi secara konsisten dengan pemerintah SBY-JK. Apalagi kini PDIP sudah kembali ke khitahnya, membela wong cilik.

Ternyata tidak hanya PDIP yang kini beroposisi. Partai pendukung pemerintah, seperti PKS dan PAN juga mengambil sikap menolak impor beras. Bahkan kepala daerah di sebagian wilayah timur juga mengambil sikap menolak. Lebih jauh lagi, Agung Laksono yang juga menjadi pemimpin Partai Golkar dan Ketua DPR memilih sikap menolak. Bahkan lebih hebat lagi, Menteri Pertanian sendiri juga ikut menolak. Padahal mereka semua berada dalam barisan pemerintahan.

Jangankan public, politisi saja sempat bingung. Apakah sah dan etis jika bagian dari pemerintahan beroposisi terhadap kebijakan pemerintah sendiri? Bahkan tokoh dari kalangan Partai Democrat meminta pemerintah memecat menteri yang juga beroposisi atas kebijakan impor beras itu.

Politik sudah berubah. Jargon hidup atau mati mendukung pemerintah, atau di semua musim selalu beroposisi atas pemerintah sudah selesai. Di era modern, politisi, pengamat, partai atau lembaga pemerintah sekalipun berpolitik berdasarkan visi. Jika kebetulan kebijakan pemerintah satu visi, kebijakan itu didukung. Sebaliknya, jika kebetulan kebijakan itu berbeda visi, kebijakan itu ditolak. Beroposisi atau tidak, itu sekarang tergantung pada kebijakan.

Amerika Serikat dapat menjadi contoh. Presiden Clinton, misalnya, datang dari Partai Demokrat. Untuk kebijakan tertentu bahkan Clinton kadang ditentang oleh partainya sendiri di Kongres. Tetapi untuk isu lainnya, tidak jarang pula Clinton didukung oleh partai lawan, Partai Republik.

Dunia modern, apa daya, sudah sedemikian kompleks dan beragam. Ada banyak visi politik. Visi itu tidak lagi dipisahkan menjadi benar dan salah, tetapi variasi nilai dan ideology yang berbeda saja. Mereka yang mendukung impor beras atau yang menentangnya sama sahnya.

Koalisi pemerintahan di Indonesia sudah “dari sononya” memang tidak dibangun berdasarkan visi. Mengapa partai tertentu berkoalisi dan beroposisi dalam politik kita saat ini sepenuhnya ditentukan oleh kesepakatan elitnya. Akibatnya, koalisi ini akan rentan sekali pecah ketika harus berhadapan dengan isu besar yang ideologis seperti pengurangan subsidi BBM atau impor beras. Wajar saja jika ada barisan di dalam pemerintah sendiri kini beroposisi. Yang aneh justru jika ada partai yang selalu mendukung pemerintah atau selalu beroposisi menentangnya.*

Catatan Politik Minggu Ini

Negara dalam Negara di Aceh?

Dua pengamat politik yang sama-sama cinta NKRI terlibat dalam perdebatan tajam di sebuah warung kopi mengenai kesepakatan damai Indonesia dan GAM yang baru saja ditandatangani. Perbedaan pendapat dua pengamat ini mencerminkan respon elit politik Indonesia yang terbelah atas kesepakatan damai itu.

Mereka sama-sama antiperang dan tidak menyukai kekerasan terus menerus mewarnai Aceh. Mereka sama-sama peduli masa depan rakyat Aceh. Namun, mereka memiliki posisi sangat bertentangan dengan banyak isi kesepakatan itu. Yang pro berargumentasi bahwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) kini semakin kukuh karena pemberontak di Aceh sudah mengakuinya sebelum 60 tahun Indonesia merdeka. Sementara yang kontra berpendapat sebaliknya, bahwa telah lahir negara dalam Negara di Aceh yang akan menjadi inspirasi bagi provinsi kaya lainnya untuk memberontak terhadap NKRI.

Pengamat yang pro membuka perdebatan berujar, “Alhamdulillah, enam puluhan tahun Indonesia merdeka mendapatkan kado teramat istimewa. Pemberontakan yang paling gigih di Aceh, yang memimpin GAM (Gerakan Aceh Merdeka) selama kurang lebih 30 tahun sudah kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Memperingati enam puluh tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sambil menatap merah putih, kepala kita bisa lebih tegak.”

“Ini salah satu pencapaian politik terbesar selama enam puluh tahun kemerdekaan,” ujar sang pengamat ini lebih lanjut. “Tak banyak monument politik raksasa selama kita merdeka. Kesepakatan damai di Aceh saat ini sama monumentalnya dengan lahirnya Orde Reformasi di tahun 1998, amandemen UUD 45, pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung.”

Pengamat yang kontra segera menimpali. “Bung, kita semua sukacita jika Aceh damai. Namun isi kesepakatan damai di Aceh saat ini adalah blunder besar. bukan prinsip NKRI yang ditegakkan di Aceh. Coba Anda baca lagi lebih detil kesepakatan damai itu. Perjanjian itu sudah melahirkan Negara dalam Negara. Kini, Aceh sudah menjadi wilayah lain yang berbeda kekuasaannya dengan seluruh provinsi di Indonesia.”

Dengan bersemangat, pengamat yang kontra ini memaparkan bukti-bukti. “Coba kau periksa isi kesepakatan itu, butir penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Kekuasaan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Indonesia bisa dibatalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk segala kasus menyangkut Aceh, padahal DPR itu wakil seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Aceh, yang dipilih dalam pemilu demokratis.”

Ia pun menyitir secara lengkap bunyi kesepakatan itu. “Coba kau dengar, aku bacakan butir 1.1.2.c, ‘Keputusan-keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. Ini prinsip yang sangat terang benderang melawan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana mungkin keputusan DPR dikalahkan oleh legislatif Aceh.'

Semakin bersemangat pengamat yang kontra ini mencari bukti pendukung lainnya. "Coba sekarang kau dengar aku bacakan butir lainnya, 1.1.2d, 'kebijakan-kebijakan administrative yang diambil pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan kepala pemerintahan di Aceh.' Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh seluruh warga Indonesia, termasuk yang di Aceh, juga tidak berkuasa di Aceh. Apapun yang ingin ia lakukan, harus disetujui dulu oleh kepala pemerintahan Aceh."

Dengan gemetar pengamat yang kontra ini berseru, "ini jelas bukti paling nyata bahwa Aceh sudah menjadi negara dalam Negara. Lebih jauh lagi, kesepakatan ini sudah menentang konstitusi karena sudah membuat presiden Republik Indonesia dan DPR Republik Indonesia tidak berkuasa lagi di wilayah resmi Indonesia di Aceh. Mahkamah konstitusi harus membatalkan prinsip ini demi tegaknya konstitusi yang sudah susah payah kita amandemen."

Pengamat yang pro segera membalas, "Bung, Anda jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Butir yang Anda kutip itu harus dibaca dalam kesatuannya. Kini giliran Anda yang mendengar. Saya akan kutip butir 1.1.2a, 'Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sector public, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri,

pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi.’

“Ketentuan ini sangat jelas membatasi pemerintahan Aceh di Aceh sendiri. Untuk bidang-bidang yang penting, seperti hubungan luar negeri, moneter, peradilan, pemerintahan di Aceh tetap tunduk kepada pusat. Tidak benar ada Negara dalam Negara akibat kesepakatan damai itu.”

Lebih lanjut lagi, pengamat ini menguraikan latar belakang kesepakatan. “Anda harus melihatnya dalam perspektif sejarah, Bung! Harga politik paling tinggi sudah kita dapati dari pemimpin GAM. Mereka kini bersedia mengakui NKRI. Mereka tidak lagi menganggap kemerdekaan Aceh itu penting. Mereka akan serahkan senjata.”

“wajar saja jika mereka juga diberi konsesi yang juga besar. Ada partai local . Ada kesepakatan yang tadi Anda sebut. Ada kompensasi ekonomi bagi aktivis GAM. Jika tidak, mereka tidak akan tertarik dengan kesepakatan damai. Sudah tiga puluh tidak ada solusi di Aceh. Sudahlah, Bung! Jangan terpaku pada hal kecil. Tetap saja hal besar bahwa GAM tidak lagi ingin merdeka.”

Pengamat yang kontra kembali beraksi. “Bung, sudah aku katakan tadi bahwa aku senang GAM tidak ingin merdeka lagi. Namun yang aku protes, pemerintah member terlalu banyak. Yang tidak terpikirkan oleh kita sekarang, GAM akan menjadi idola para pemberontak bersenjata lainnya. Sekarang Papua sudah bergolak. Mungkin daerah kaya lain akan pula melakukan hal serupa.”

“Mereka akan mengambil pelajaran dari GAM bahwa jika mereka ingin berontak, memberontaknya jangan tanggung-tanggung. Jika mereka meniru GAM, berbasis di luar negeri,

tidak mudah menyerah dengan represi militer, mereka akan diistimewakan seperti GAM. Bukannya mereka dipenjara, tetapi para pemberontak ini dihormati layaknya pahlawan dan dibagi-bagi tanah segala. Sementara warga negara yang sejak dulu patuh dengan NKRI, tidak pernah memberontak dengan senjata, tidak diberikan kompensasi apa-apa. Ini semua terbalik-balik.”

Pengamat yang pro kembali membantah. “Bung, Aceh ini kasus khusus,tidak bisa kasus Aceh itu Anda generalisasi. Namun, aku hormati pandanganmu. Ini demokrasi toh. Kita boleh sepakat untuk tidak sepakat.”

Dua pengamat itu tidak pernah berujung kepada kesepakatan mengenai isi perjanjian damai di Aceh. Sebagaimana dua pengamat itu, komunitas elite politik di Indonesia juga mengalami ketidaksepakatan yang sama. Disinilah keindahan demokrasi. Semua pandangan diberikan tempat. Pemerintah memang harus mengambil keputusan yang tidak bisa memuaskan semuanya. *

Aceh yang Membelah Kita

BAGI pemerintah SBY-JK, akankah kesepakatan damai Aceh itu menjadi berkah atau awal bencana politik? Ini mungkin pertanyaan paling hot yang sekarang mendominasi komunitas elite politik Indonesia.

Kian hari semakin berkembang bahwa kesepakatan Aceh memang semakin membelah elite politik dalam sikap pro dan kontra yang sangat tajam. Bagi pihak yang pro, kesepakatan damai di Aceh itu jelas berkah bukan hanya bagi pemerintahan SBY-JK, melainkan juga bagi public Aceh sendiri dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Aceh dianggap menjadi momentum lompatan politik baru. Untuk pertama kalinya sejak tiga puluh tahun lalu, GAM (Gerakan Aceh Merdeka) bersedia tidak menggunakan senjata untuk mencapai target politiknya. Perlahan tetapi pasti, GAM diyakini akan melebur dalam naungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ini akan menjadi prestasi politik yang luar biasa bagi SBY-JK menjelang setahun pemerintahannya.

Sebaliknya, bagi yang kontra, kesepakatan Aceh ini dianggap blunder tidak hanya bagi pemerintahan SBY-JK, tetapi juga bencana bagi NKRI dan public Indonesia pada umumnya. Argumen pihak yang pro, kesepakatan Aceh itu sudah mengarah kepada pemberian self-government, yang membuat Pemerintah Indonesia tidak lagi berkuasa penuh atas Aceh.

Jika terjadi masalah pada pelaksanaan kesepakatan itu, kata akhir bukan lagi di tangan Pemerintah Indonesia, melainkan berada pada otoritas satu orang asing, yaitu mantan Presiden Finlandia yang bernama Martti Ahtisaari. Kesepakatan itu dianggap sudah menggeser otoritas atas Aceh dari Pemerintah Indonesia ke orang asing.

Kubu yang kini berhadap-hadapan secara politik mengenai kasus Aceh juga tehitung kelas berat. Kubu yang pro adalah pemerintah eksekutif yang di-back-up penuh oleh SBY dan JK sendiri. Kubu ini mendapatkan dukungan dari banyak politisi, pakar, dan juga public luas.

Sementara kubu yang kontra, tidak kalah kuatnya. Kubu ini dipimpin secara informal oleh dua mantan presiden, Megawati Soekarnoputri dan Gus Dur. Mereka kini melakukan konsolidasi untuk mempengaruhi DPR. Sementara tidak kalah banyaknya lapisan para pakar, politisi dan public luas, secara terang-terangan ataupun diam-diam, yang memihak kepada kubu ini. Sebagian komunitas tentara Indonesia juga merasa diwakili oleh kubu ini.

Bagi kubu yang pro, kasus kesepakatan Aceh ini akan semakin memperkuat leadership SBY-JK. Dua tokoh ini akan semakin membuktikan diri berani mengambil inisiatif yang penuh resiko demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Tentu dalam prosesnya, ada penentangan atas kebijakan damai di Aceh. Namun, kubu ini meyakini pada waktunya, penentangan itu akan hilang.

Sementara bagi yang kontra, kasus kesepakatan Aceh itu justru akan memperlemah politik SBY-JK. Sebaliknya, kekuatan oposisi mendapatkan momentum dan isu untuk konsolidasi. Apalagi kini Negara berada dalam situasi sulit karena persoalan BBM dan listrik. Publik luas dipercayai akan mudah dimobilisasi untuk memperkuat kubu oposisi. Bahkan, kubu ini juga meyakini akan dapat mengambil hati komunitas tentara Indonesia.

Apa yang menjadi penyebab pro dan kontra itu? Tentu saja bukan prospek damai di Aceh yang menjadi isu yang membelah pro dan kontra. Mayoritas public Indonesia dan elite politik yang sehat dan rasional mengharapkan perdamaian dapat tegak di Aceh. Yang menjadi isu, apakah Indonesia telah mengorbankan terlalu banyak prinsip ketatanegaraannya sendiri, bahkan kedaulatannya, demi mengambil hati para petinggi GAM, yang sebenarnya dianggap sudah melemah itu?

Pihak yang pro berkeyakinan bahwa tidak ada satu ayat UUD 45 yang dikorbankan. Memang konsensi terhadap GAM sangat besar. Namun, kita juga memperoleh hal yang lebih besar lagi, yaitu kesediaan GAM untuk tidak lagi menuntut kemerdekaan. Sebaliknya, bagi pihak yang kontra, kesepakatan Aceh itu sebenarnya adalah bentuk legal dari pemberian self-government kepada Aceh, yang bertentangan dengan prinsip NKRI.

Perbedaan persepsi atas substansi kesepakatan itu juga didorong oleh butir-butir kesepakatan yang dapat melahirkan multiinterpretasi. Sebuah kesepakatan tingkat tinggi, dengan konsekuensi politik yang sangat besar, menciptakan persoalan sendiri jika tidak dirumuskan dalam bahasa yang tegas, konkret, dan tidak membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda.

Isu pertama yang menyatakan bahwa GAM tidak bubar. Kesepakatan hanya mengubah strategi perjuangan GAM saja.

Jika dulu GAM bertindak secara militer, kini GAM bertindak melalui jalan politik saja. Karena itu, dalam kesepakatan tersebut, GAM harus menyerahkan semua peralatan militernya. Namun, tidak ada satupun butir kesepakatan yang menyatakan bahwa GAM membubarkan diri, atau GAM menerima NKRI.

Jika GAM membubarkan diri, proses perdamaian justru dianggap sulit dijalankan. Siapa yang akan bertanggung jawab menjalankan kesepakatan itu jika pihak yang menandatangani kesepakatan sudah tidak ada lagi karena membubarkan diri. Walau GAM tidak bubar, menurut pihak ini, GAM sudah tidak lagi menuntut merdeka.

Sebaliknya, pihak kedua menyatakan bahwa GAM otomatis sudah bubar karena sudah menerima prinsip politik dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jelas tercermin dalam kesepakatan itu bahwa tidak ada lagi celah untuk menuntut merdeka. Eksistensi GAM, yang merupakan singkatan dari Gerakan Aceh Merdeka, tidak lagi relevan.

Pihak ini memang menyayangkan bahwa pembubaran GAM tidak tercantum secara eksplisit. Namun, menurut pihak ini, ayat per ayat kesepakatan itu sebenarnya sudah menguburkan ideology kemerdekaan yang selama ini menjadi apinya GAM.

Isu kedua yang juga mengandung multiinterpretasi karena tidak diatur secara detail adalah mengenai pengadilan HAM. Dalam kesepakatan itu tidak dituliskan secara tegas, apakah pengadilan HAM itu hanya untuk kasus setelah kesepakatan ditandatangani. Menjadi hal aneh memang, mengapa ayat mengenai pengadilan itu tidak dibuat detail. Padahal, soal pengadilan HAM itu dapat menjadi salah satu batu sandungan.

Akibatnya, terjadi multiinterpretasi yang dapat memicu konflik lebih jauh. Pendapat pertama menyatakan bahwa

semua harus dikembalikan kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia dan prinsip universal. Kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap tidak mengenal batas waktu. Kasus pelanggaran HAM di masa silam, sebelum kesepakatan ditandatangani, akan tetap diproses.

Pendapat kedua menyatakan sebaliknya. Proses damai di Aceh tidak akan terjadi jika kejahatan HAM di masa silam diungkit kembali. Menjadi ironi jika pemimpin GAM diberikan amnesty dan diberikan kompensasi, sementara tentara Indonesia terancam diadili oleh pengadilan HAM. Padahal tentara berjuang demi NKRI, sementara GAM justru memberontak atas NKRI. Menurut pandangan ini, pengadilan HAM hanya untuk kasus setelah kesepakatan ditandatangani.

Niat baik, luhur dan besar untuk berdamai haruslah menjadi kekuatan utama yang mengalahkan pertimbangan lain. Segala hal lain yang belum jelas dan bermasalah, semoga cepat diselesaikan, diperjelas, jika perlu dimodifikasi, agar proses damai ini selaras dengan UUD 45, dan tidak ada kekuatan politik berpengaruh yang merasa dianaktirikan. *

Publik Menyalahkan Tim Ekonomi?

DUA bulan dari saat ini, tepatnya 20 Oktober 2005, pemerintahan SBY-JK berusia setahun. Dalam tradisi demokrasi, akan ada evaluasi public yang luas mengenai baik dan buruk kinerja SBY-JK. Para pakar akan membuat review panjang lebar. Politisi dan oposisi tidak kalah sigap membuat aneka pernyataan politik. Kalangan pers juga tidak ketinggalan meramaikan evaluasi.

Lingkar Survey Indonesia menampilkan pihak yang secara moral paling berhak mengevaluasi setahun SBY-JK. Mereka adalah 150 Juta pemilih yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua. Di tahun 2004, mereka yang member mandate kepada SBY-JK untuk menjadi presiden dan wakil presiden dengan harapan perubahan.

Menjelang setahun setelah memberikan mandate, apa yang rasakan oleh mereka? Apakah mereka merasa mandat dan janji kampanye itu sudah dijalankan? Ataukah sebaliknya, mereka

menganggap SBY-JK belum maksimal, mengecewakan, dan mengerjakan politics as usual.

Saat ini kegaduhan dan kecemasan memang terjadi di kalangan elite kota, pengusaha, politikus, dan para pakar. Kurs rupiah jatuh bebas. Indeks saham turun. Tuntutan reshuffle cabinet khususnya kementerian ekonomi mulai terdengar.

Namun saat ini, apa yang dirasakan oleh 150 juta pemilih di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke? Apakah mereka merasakan kegundahan yang sama, yang sekarang ini terjadi di kalangan menengah perkotaan?

Ini salah satu pertanyaan yang ingin dijawab oleh survey nasional. lingkaran Survei Indonesia memilih 1.000 responden di 100 desa dan kotadari seluruh provinsi di Indonesia. Responden dipilih melalui metode yang standar, multi stage random sampling. Wawancara dilakukan tatap muka. Dari karakteristik responden, diketahui bahwa survey ini tidak bias ke kelompok tertentu, tetapi secara proporsional mewakili populasi pemilih Indonesia. Survei dikerjakan pada 11-15 Agustus 2005.

Secara umum, public kecewa dengan kondisi ekonomi. Lebih banyak responden yang menyatakan kondisi ekonomi saat ini buruk dibandingkan baik. Hanya minoritas yang menyatakan ekonomi saat ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Mayoritas beranggapan kondisi ekonomi menjelang setahun SBY-JK tidak ada perubahan, bahkan lebih buruk. Mandat perubahan dianggap belum dilaksanakan, padahal lebih 60 % responden menyatakan masalah ekonomi adalah masalah paling penting dan prioritas utama.

Yang menarik, walau public kecewa dengan kondisi ekonomi, popularitas SBY tetap tinggi. Kepuasan atas kinerja SBY di atas 60 %, di atas jumlah pemilihnya ketika pemilu presiden tahap

dua. Mengapa ada jarak yang lebar antara kekecewaan public atas isu ekonomi di satu pihak dan popularitas SBY yang masih tinggi di pihak lainnya?

Pertama, public tidak menyalahkan SBY atas buruknya kinerja ekonomi. Publik menyalahkan kementerian ekonomi dan keuangan. Popularitas tim ekonomi ini di mata public cukup rendah, di bawah 40%. Popularitas tim ekonomi ini di bawah popularitas kementerian lainnya.

Kedua, di luar ekonomi, public puas dengan kinerja SBY-JK. Pemberantasan korupsi, seruan, perang atas narkoba, perjudian, dan premanisme, mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi. Publik melihat persoalan buruk kinerja pemerintahan tidak terjadi di semua bidang; di bidang nonekonomi yang banyak success story.

Ketiga, public juga menyukai personalitas SBY. Dalam angka yang cukup tinggi, public meyakini bahwa SBY memperjuangkan kepentingan rakyat, berwibawa, jujur, dan pintar. Kualifikasi personalitas ini menjadi kompensasi yang membuat SBY tetap populer walau public kecewa dengan kondisi ekonomi.

Namun untuk ke depan, SBY harus lebih memprioritaskan perbaikan konkret ekonomi. Gonjang-ganjing yang berawal dari masalah ekonomi dapat berubah menjadi gerakan dan goro-goro politik. Hanya krisis ekonomi yang mampu menjatuhkan Soeharto, politikus paling kuat era Indonesia modern. SBY-JK tentu lebih sulit dijatuhkan akibat konstruksi konstitusi yang sudah diamanjemen. Namun goro-goro politik yang disebabkan oleh ketidakpuasan ekonomi yang meluas dapat melumpuhkan pemerintahan sementara waktu.

Gonjang-ganjing ekonomi juga dapat menjadi momentum bagi tumbuhnya oposisi yang kuat terhadap SBY-JK menjelang

setahun pemerintahannya. Public yang sudah kecewa dengan ekonomi, ditambah lagi oleh isu pengangguran, isu kenaikan BBM, isu jatuhnya harga saham, nasionalisme karena kasus GAM di Aceh, dapat membesar. Oposisi itu dapat menarik banyak segmen, mulai purnawirawan tentara dan partai besar (kasus Aceh), gerakan mahasiswa, grass root dan LSM (isu kenaikan BBM), serta buruh dan ibu rumah tangga (isu pengangguran).

Menjelang setahun usia pemerintahannya, SBY harus member sinyal yang kuat sekali bahwa akan ada perubahan dalam kondisi ekonomi bangsa. Sinyal itu dapat berupa perubahan program. Harapan perubahan ekonomi yang membuat SBY-JK diberikan mandate. Perbaikan ekonomi konkret itu pula yang dapat membuat SBY-JK bertahan kelak.

Perlukah reshuffle cabinet ekonomi dan keuangan? Bagi pemilih, tidak penting warna kucingnya. Yang penting kucing itu mampu menangkap tikus. Dengan kata lain, pemilih tidak terlalu mempersoalkan siapa yang menjadi menteri. Yang diminta adalah perubahan ekonomi konkret. Sudah sekitar delapan tahun mereka terlilit dalam masalah ekonomi sejak krisis ekonomi di tahun 1997.

Idealnya, tidak ada bongkar-pasang cabinet sampai lima tahun pemerintahan SBY-JK. Namun, tentu itu hanya bisa dilakukan dengan satu syarat. Kinerja kementerian keuangan dan ekonomi harus memuaskan. Tidak ada conflict of interest di sana, memerintah sambil berdagang, misalnya, yang dapat membuat pasar kehilangan kepercayaan. Reshuffle cabinet ekonomi harus selalu diambil sebagai pilihan terakhir ketika jalan lain memang buntu.

Menjelang setahun SBY, publik memang kecewa dengan kondisi ekonomi. Namun, yang disalahkan public saat ini adalah kementerian ekonomi dan keuangan.*

Tes Kepemimpinan Presiden

Empat tahun dari sekarang, di akhir masa jabatannya, bagaimanakah public luas, pengamat, dan sejarawan mengenang leadership SBY-JK? Akankah mereka dikenang sebagai the great leaders? Akankah mereka bukan saja dianggap pemimpin pertama Republik Indonesia yang dipilih langsung, melainkan juga yang meletakkan banyak hal fundamental menuju pemerintahan Indonesia modern?

Ataukah penilaian itu akan sebaliknya dan penuh sinisme. Akankah mereka, misalnya, hanya dianggap just another Mr. President dan Mr. Vice President, tanpa achievement yang berarti? Mereka, misalnya, dianggap beruntung dilindungi oleh konstitusi sehingga terhindar dari aneka upaya impeachment pihak oposisi? Namun, walau gagal dijatuhkan, mereka dianggap hanya sebagai pemimpin yang lumpuh dan tidak efektif?

Ini pertanyaan yang paling perspektif dan visioner atas kemelut yang saat ini terjadi. Apa pun yang diputuskan presiden

saat ini akan menentukan nasib politiknya. Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia yang baru saja dipublikasi menunjukkan publik luas masih percaya kepada personality presiden. Publik merasa presiden jujur, perhatian pada rakyat dan bekerja keras. Trust kepada kepribadian ini, bukan kinerjanya, yang membuat SBY masih populer.

Namun, banyak yang mulai khawatir jika SBY terkena sindrom *good politician but bad policies*". Dari criteria kapabilitas pribadi, integritas, dan akseptabilitas, tidak diragukan SBY adalah *good politician*. Namun, dikhawatirkan SBY acapkali membuat kebijakan atau keputusan yang buruk karena harus negosiasi dan bargain dengan kekuatan politik lain. Akibatnya, banyak kebijakan pentingnya tidak dilahirkan melalui visi yang gemilang, tetapi akibat lobi politik tingkat tinggi.

Keputusan yang sulit kini harus diambil SBY menyangkut subsidi BBM. Saat ini mungkin tidak ada kebijakan yang lebih panas dari politik BBM. Isu politik lain sangat mungkin hanya beredar dan konfliktual di kalangan elit politik saja. Namun, isu BBM ini langsung membakar jutaan rakyat biasa yang hidup semakin sulit.

Isu BBM lebih menyulitkan SBY karena konstruksi politik elit. SBY hanya menguasai satu fragmen dalam politik elit itu. Partai yang sepenuhnya dapat dikontrol hanyalah Partai Demokrat. Sementara di parlemen, suara Partai Democrat sekitar 10% saja. Di masyarakat luas, Partai Demokrat juga belum mengakar.

Partai Golkar memang partai terbesar di parlemen. Dukungan Partai Golkar kepada SBY akan sangat signifikan. Namun, Golkar tidak sepenuhnya dikontrol SBY. Golkar ada di tangan Jusuf Kalla, selaku wakil presiden. Dukungan Partai Golkar tidak akan pernah diperoleh SBY secara gratis.

Seandainya pun Partai Demokrat dan Partai Golkar bersatu, gabungan dua partai ini masih kurang dan di bawah 50%. Untuk menang dalam mekanisme voting di parlemen, dua partai ini membutuhkan dukungan partai lain. Sekali lagi, dukungan partai lain itu tidak pernah tanpa imbalan. Dalam politik ada pepatah : no such thing as free-lunch.

Sejak awal, kekuatan SBY memang bukan pada politik elit. Bahkan ketika mencalonkan diri sebagai presiden, mayoritas elit mendukung Megawati Soekarnoputri. Tiga partai terbesar saat itu: PDIP, Golkar, dan PPP bersatu di belakang Megawati. Ketua umum ormas terbesar NU, Hasyim Muzadi, juga berada di belakang Megawati.

Dari dulu hingga sekarang, kekuatan SBY memang ada pada persepsi rakyat banyak. Kekuatan riil SBY karena ia dipercaya rakyat mampu membuat perubahan, terutama di bidang ekonomi. Dengan dukungan luas rakyat Indonesia, SBY dapat berbuat banyak menghadapi manuver politik elit.

Isu BBM punya potensi mengalihkan dukungan rakyat banyak kepada SBY. Jika program kompensasi tidak jalan, kenaikan BBM segera mengakibatkan semakin sulitnya kehidupan rakyat banyak. Mereka segera menjadi rumput kering yang mudah sekali diprovokasi. Hilangnya trust rakyat banyak kepada SBY sekaligus berarti hilang pula sumber kekuatan politik SBY. Elit politik semakin mudah memainkan kartu untuk bargaining dengan SBY.

Keputusan untuk menaikkan BBM tampaknya sudah diambil. Waktu yang dipersiapkan untuk kenaikan itu sekitar Oktober. Sangat mungkin SBY ingin waktu setahun pemerintahannya dilewati dulu, 20 Oktober 2005. Dengan demikian, tidak tercatat oleh rakyat banyak bahwa dalam setahun pemerintahannya, SBY menaikkan BBM dua kali.

Upaya menaikkan harga BBM sebenarnya jauh lebih mudah jika kompensasi BBM yang dulu dijanjikan sudah terealisasi. Slogan pendidikan dan kesehatan kelas tiga gratis, sebagai bagian dari program kompensasi, misalnya, sudah dirasakan publik luas. Jika tidak, public mudah sekali terprovokasi bahwa presiden dan pembantunya hanya memberi perhatian pada kenaikan BBM saja. Sementara janji kompensasinya kurang diperhatikan dan dikontrol implementasinya.

September bulan ini, aneka program kompensasi dikonkretkan. Langkah ini cukup menunjukkan betapa SBY sangat ingin menjaga persepsi rakyat banyak. Tuduhan tidak peduli pada nasib rakyat kecil pastilah akan sangat menyakiti hati SBY. Justru kenaikan BBM itu harus ditunjukkan oleh SBY dalam rangka subsidi yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung dengan uang cash kepada kelompok yang ditargetkan harus benar-benar dikontrol pelaksanaannya.

Menjelang dan sebulan setelah kenaikan BBM dapat diduga akan terjadi aneka gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai kota. Perlu masa transisi sebelum semua kehidupan ekonomi normal kembali. Dalam masa transisi itu, publik oposisi juga tidak akan tinggal diam. Mereka menemukan panggung kembali.

Berbeda dengan kenaikan BBM di era awal pemerintahan SBY, isu BBM setelah Oktober 2005 ini sudah menjadi isu BBM plus. Isu BBM tidak lagi berjalan sendirian. Ada pula isu kesepakatan Republik Indonesia-GAM. Ada pula isu Panglima TNI yang perlu pergantian. Ada pula kasak-kusuk partai politik yang ingin jatah menteri. Semua mengambil posisi dan “jurus silat” masing-masing.

Jika semua ledakan protes itu dapat diatasi oleh SBY-JK, sangat mungkin di tahun kedua pemerintahannya, SBY-JK justru

akan semakin kuat. Public, pakar, dan sejarawan akan menilai mereka sebagai tipe pemimpin yang punya visi dan berani membuat keputusan beresiko.

Namun, jika ledakan protes itu terus terakumulasi tanpa bisa diatasi secara baik, pemerintahan SBY-JK dapat saja tidak lagi efektif. Mereka memang tidak bisa dipecat karena tidak ada pelanggaran hukum yang dikerjakan, tetapi hanya akan dikenang sebagai “just another president”. Selama masuk ke dunia public, mungkin saat itu adalah tes kepemimpinan paling beresiko yang pernah dialami SBY. *

Politik Dua Mantan Presiden

Indonesia, sebagaimana Amerika Serikat, punya dua mantan presiden yang saat ini masih sangat aktif dalam ruang publik. Indonesia punya Megawati Soekarnoputri dan Gus Dur. Sementara Amerika Serikat punya Clinton dan George Bush senior . dua mantan presiden ini, baik di Indonesia ataupun amerika Serikat, kerap menjadi berita media massa karena aktivitasnya.

Perbedaannya, di Amerika Serikat dua mantan presiden itu bekerja membantu presiden yang tengah berkuasa. Kerja yang mereka lakukan bersifat komplementer dan melengkapi kebijakan Presiden amerika Serikat. Sementara di Indonesia, dua mantan presiden justru menjadi oposisi. Yang mereka kerjakan, justru mengkritik dan memobilisasi perlawanan terhadap kebijakan presiden yang tengah berkuasa.

Di Amerika Serikat, Clinton dan George Bush memobilisasi masyarakat luas meringankan tugas presiden yang

tengah berkuasa. Bencana alam menimpa New Orleans. Sebelumnya, bencana alam menimpa Asia melalui gelombang Tsunami. Pemerintah Amerika Serikat tidak bisa seorang diri mengatasi bencana itu. Kekuatan politik Amerika Serikat justru ada pada inisiatif dan kerja sukarela masyarakatnya. Dua mantan presiden memobilisasi politik masyarakat itu.

Untuk badai yang menimpa New Orleans, dua mantan presiden Amerika Serikat bergerak mengumpulkan dana. Mereka “kampanye” ke public Amerika Serikat dan juga dunia bahwa partisipasi publik luas untuk menolong pihak korban saat ini sangat berarti. Partisipasi itu mungkin masih dapat menyelamatkan hidup pihak korban yang tengah kritis. Atau partisipasi itu sangat membantu meringankan korban yang masih hidup.

Sebelumnya, dua mantan presiden itu juga pergi ke Srilanka dan Aceh. Mereka melihat sendiri amuk badai terbesar dalam sejarah modern pasca-Perang Dunia II. Dua tokoh itu pula yang ikut menggalakkan tambahan dana bagi korban Tsunami. Presiden yang tengah berkuasa merasa sangat tertolong oleh aktivitas, inisiatif, dan mobilisasi yang dikerjakan dua mantan presiden sebelumnya.

Sebaliknya di Indonesia, dua mantan presiden justru tengah beroposisi terhadap presiden yang kini tengah berkuasa. Gus Dur memimpin sendiri demo “mengepung” istana. Gerakan ini menolak kebijakan presiden mengenai Aceh dan rencana kenaikan BBM. Isu yang dilontarkan lumayan sangat merepotkan presiden sekarang. Keutuhan NKRI dianggap terancam. Nasib rakyat kecil juga dianggap akan semakin sulit.

Tidak berbeda dengan Gus Dur, Megawati juga punya jurus oposisi yang juga cukup merepotkan presiden yang berkuasa. Di Lemhanas, Megawati berpidato secara resmi, menggambarkan sisi bahaya kebijakan yang diambil presiden saat ini mengenai

Aceh. Sementara partai yang dipimpinnya, PDIP, terus-menerus memobilisasi opini di parlemen ataupun di public luas mengenai rencana kenaikan harga BBM yang akan membuat rakyat kecil semakin sengsara.

Apa yang membuat beda politik dua mantan presiden di Indonesia dan di amerika Serikat? Mengapa dua mantan presiden di Amerika Serikat selaras dengan presiden yang tengah berkuasa? Mengapa pula untuk kasus Indonesia, dua mantan presiden itu justru berposisi dan berhadap-hadapan secara frontal dengan presiden yang kini sedang in charge?

Dua hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, karakter isu yang sedang digeluti oleh dua mantan presiden itu, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Kedua, kualitas hubungan pribadi dua mantan presiden itu dengan presiden yang sedang berkuasa, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Isu yang tengah digeluti dua mantan Presiden Amerika Serikat adalah isu yang memang cenderung menyatukan semua kekuatan politik. Para tokoh bisa saja saling berhadapan atau saling menjatuhkan karena perbedaan posisi politik. Namun, ketika terlibat dalam kasus bencana alam yang mengakibatkan matinya puluhan bahkan ratusan ataupun ribuan manusia, umumnya para tokoh bersatu.

Bencana alam memang cenderung menyatukan politisi. Tidak ada hal lain yang bisa dikerjakan dalam menghadapi bencana alam kecuali memberikan pertolongan darurat dan mengupayakan bantuan secepat mungkin, baik bagi pihak keluarga korban yang mati maupun yang masih hidup. Simpati public akan diberikan kepada tokoh yang terlihat bekerja tanpa pamrih, tidak berpolitik dan murni menolong.

Bencana alam di New Orleans dan tsunami di Asia tidak bisa lain membuat pihak oposisi sekalipun harus berdiri di belakang presiden yang kini tengah berkuasa. Bahkan untuk kasus tsunami di Aceh, Megawati dan Gus Dur juga terlibat aktif, dengan porsi dan caranya sendiri, dalam menangani bencana.

Sementara itu, isu yang kini tengah dialami oleh mantan presiden Indonesia punya karakter yang sangat berbeda. Dua isu yang mereka hadapi adalah isu panas : Aceh dan BBM. Dua isu itu sangat konfliktual karena memang memungkinkan politisi mengambil sikap yang sangat bertentangan walaupun masing-masing pihak tanpa pamrih memperjuangkan kepentingan umum.

Isu Aceh memang menjadi pedang bermata dua. Jika berhasil, perdamaian Aceh itu menjadi tonggak besar dalam politik Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemberontakan bersenjata Aceh diselesaikan. Perdamaian itu segera menjadi success story dengan kaliber hadiah nobel perdamaian.

Namun jika gagal, kasus perdamaian itu justru menjadi pemicu dan insentif bagi rusaknya keutuhan NKRI. Aceh menjadi negara dalam Negara. Wilayah lain yang kaya segera mendapatkan insentif untuk meniru Aceh. Pemberontak bersenjata di wilayah lain juga segera mengidolakan GAM agar juga diakomodasi seperti pemerintah sekarang mengakomodasi GAM.

Isu BBM juga sama konfliktualnya. Jika subsidi dikurangi dan gejolak politik bisa diatasi, pemerintah selanjutnya lebih ringan. Begitu banyak dana bisa disediakan untuk program kesejahteraan bagi rakyat kecil. Subsidi yang selama ini juga dinikmati orang kaya akan lebih terarah.

Sebaliknya, jika kompensasi dan aneka pengalaman lain gagal, kenaikan BBM itu akan segera menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Persentase pendapatan untuk konsumsi di

luar makan menjadi lebih kecil bagi banyak orang. Kehidupan rakyat kecil semakin susah sebelum pemerintah mampu menambah program kesejahteraan.

Dua isu itu, GAM dan BBM, memang dapat memecah para politikus yang sama-sama baik sekalipun dalam situasi saling berhadapan. Tidak heran jika di Indonesia, dua mantan presiden justru menjadi oposisi paling tangguh terhadap presiden yang kini sedang berkuasa.

Di samping karakter isu, kualitas hubungan pribadi juga menentukan. Di Amerika Serikat, hubungan pribadi Clinton dan George Bush senior terhadap presiden saat ini baik-baik saja. Bagaimana tidak baik? George Bush senior adalah ayah dari presiden sekarang. Sementara Clinton tidak pernah terlibat secara langsung berkonfrontasi dengan presiden saat ini.

Berbeda halnya dengan mantan Presiden Indonesia saat ini. Hubungan Megawati dan SBY sudah buruk menjelang pemilihan presiden. SBY mengundurkan diri sebagai menteri karena merasa diisolasi di akhir pemerintahan Megawati. Sementara Megawati, tidak kunjung menyalami secara fisik SBY yang terpilih sebagai presiden.

Gus Dur juga merasa “disisihkan” sebagai calon presiden oleh KPU. Kini salah satu tokoh KPU itu menjadi menteri SBY dan tokoh perundingan Republik Indonesia-GAM. Gus Dur juga merasa “diobok-obok” oleh dua mantan anak buahnya, Alwi Shihab dan Saefullah Jusuf soal PKB. Sementara dua tokoh ini menjadi menteri SBY.

Kita berharap waktu akan menyembuhkan persoalan pribadi ataupun politik yang membuat dua mantan Presiden Indonesia justru berseberangan dengan presiden yang berkuasa. Jika mereka bersatu, bukankah Indonesia akan lebih kuat? *

Lahirnya Politik Oposisi

Naiknya harga BBM 1 Oktober 2005 menjadi lahan yang subur bagi politik oposisi. Sebelumnya, oposisi politik hanya bergema di komunitas elit. Mereka yang berseberangan dengan pemerintah hanyalah segelintir tokoh nasional atau elit partai belaka. Dengan naiknya BBM, elit yang beroposisi itu mendapatkan momentum dan potensi dukungan grass root secara luas.

Persoalannya, jenis politik oposisi bagaimana yang akan tumbuh? Apakah itu oposisi yang sifatnya temporer belaka? Ataukah gejala ini menuju pada terbentuknya oposisi yang lebih terlembaga, sebagaimana yang tumbuh dalam Negara demokrasi yang sudah matang.

Oposisi yang terlembaga mempunyai karakter yang mudah dikenali. Mereka yang beroposisi memang memiliki gagasan kebijakan, sikap politik, dan platform yang berbeda dengan pemerintah. perbedaan antara pemerintah dan oposisi memang

harus bermula dari perbedaan kebijakan. Mereka tidak pula punya keinginan menjadi bagian dari pemerintahan. Tindakan oposisi mereka, misalnya, bukan bargaining agar mereka diakomodasi dalam cabinet.

Sebaliknya, oposisi yang temporer itu sangat fluktuatif dan oportunistis. Secara gagasan, tidak ada perbedaan yang mendasar antara oposisi itu dan pemerintah. Mereka beroposisi lebih dengan cara mencari kesalahan, bukan karena perbedaan visi yang fundamental. Ujung dari sikap oposisi mereka juga hanya ingin diakomodasi dalam kekuasaan, menjadi menteri, mendapatkan konsesi ekonomi, dan sebagainya.

Dalam sejarah reformasi sejak 1998, kita tidak pernah punya oposisi yang terlembaga. Semua politik oposisi yang muncul bersifat temporer. Apalagi di era Orde Baru, tidak ada oposisi yang tumbuh, yang mampu bertahan lama. Kondisi politik tahun 2005, sangat mungkin menjadi awal tumbuhnya oposisi jenis baru, oposisi yang lebih terlembaga.

Yang paling potensial menjadi tokoh utama oposisi yang lebih terlembaga adalah Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dari segi ketokohnya, dua tokoh ini sama-sama mantan presiden. Dari sisi instrument politik, dua tokoh ini juga sama-sama mengontrol partai besar di parlemen. Namun oposisi yang dibawa Megawati lebih jelas dibandingkan Gus Dur dilihat dari dua sisi.

Pertama, hanya Megawati dan PDIP yang secara tegas menyatakan tidak ingin ambil bagian dalam pemerintahan sekarang. Tidak ada satu pun kader PDIP yang menjadi menteri di cabinet pemerintahan sekarang. Dengan tegas pula dinyatakan oleh Sekjen PDIP bahwa seandainya pun dibuka tawaran kepada PDIP untuk ikut bergabung dalam pemerintahan, PDIP akan menolak.

Sementara dari kubu Gus Dur, belum ada pernyataan politik yang secara tegas ingin menolak bergabung dengan cabinet saat ini. Tokoh PKB seperti Alwi Shihab dan Saifullah Jusuf menjadi menteri dalam cabinet sekarang. Dua tokoh itu oleh kubu Gus Dur boleh saja ditolak sebagai representasi dari PKB. Namun, seandainya kepada kubu Gus Dur ditawarkan jabatan cabinet, masih belum pasti apakah tawaran itu ditolak.

Kedua, dari sisi gagasan memang PDIP juga lebih keras dan tegas dalam bersikap sesuai dengan platform partainya. Baik Megawati maupun Gus Dur memang menolak kenaikan harga BBM dan Memorandum of Understanding (MoU) RI-GAM. Namun, penghayatan aktivis partai atas penolakan itu lebih dalam dan tajam terjadi di kalangan PDIP ketimbang PKB.

Platform wong cilik dan nasionalis memang lebih berumur lama di komunitas PDIP ketimbang PKB. Platform ini pula yang dapat membuat PDIP mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah.

Platform wong cilik dimobilisasi untuk melawan kenaikan BBM. Di luar janji kompensasi, banyak ekonom menunjukkan bahwa kenaikan BBM itu akan menambah jumlah orang miskin. Secara common-sense pula, dirasakan kenaikan BBM itu membuat kehidupan rakyat semakin berat. Harga barang kebutuhan pokok menaik. Sementara ancaman PHK missal di depan mata. Jargon wong cilik menjadi hidup dan bertenaga dalam situasi ini.

Platform nasional dimobilisasi untuk melawan MoU RI-GAM. Bagi kalangan nasionalis yang keras, tak pernah ada ampun bagi pemberontak bersenjata yang ingin merdeka. Melalui MoU RI-GAM, bukan saja pemberontak bersenjata ini dimaafkan. Namun, Aceh diberi kekuasaan khusus yang tidak dimiliki propinsi lain yang tidak pernah memberontak. Jargon nasional memang mudah didayagunakan untuk melawan kebijakan pemerintah soal Aceh.

Megawati dan PDIP tampaknya paling potensial mengawali lahirnya sebuah oposisi yang lebih terlembaga. Jika pemerintah sekarang berhasil, oposisi itu akan semakin kehilangan suara dalam pemilu berikutnya. Namun, jika pemerintahan sekarang gagal, Megawati dan PDIP akan mendapatkan berkah dan “durian runtuh” di tahun 2009.

Mengapa baru sekarang ini potensi oposisi terlembaga itu lahir? Mengapa oposisi yang serius itu tak terkunjung terbentuk sejak pertama kali pemilu di tahun 1999 ?

Saat itu, pesona kekuasaan terlalu besar. Semua tokoh nasional dan semua partai ingin berkuasa. Tak ada yang ingin mengambil porsi oposisi. Pemerintahan Gus Dur ataupun Megawati saat itu adalah kabinet pelangi. Mereka mengakomodasi semua tokoh partai besar. Tak satu partai besar pun yang tidak punya perwakilan dalam cabinet. Bagaimana mereka dapat mengkritik pemerintah jika wakil dari partainya sendiri ada di pemerintahan?

Di samping itu, presiden yang berkuasa saat itu juga belum nyaman dengan oposisi. Jika mau, presiden saat itu, baik Gus Dur ataupun Megawati, dapat saja hanya memilih kongsi dengan beberapa partai saja. Pemilihan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, kebijakan itu tidak dilakukan karena presiden ingin merangkul semua kekuatan.

Konstruksi politik melalui Pemilu 2004 mulai mengubah situasi. Dua calon presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati, tidak berada dalam hubungan personal yang baik. Kekalahan Megawati diikuti terputusnya silaturahmi antara kedua tokoh tersebut. sampai saat ini, Megawati tidak pernah menyalami secara fisik kemenangan SBY. PDIP menjadi satu satunya partai yang tidak memiliki perwakilan di cabinet SBY.

Kebijakan perdamaian Aceh melalui MoU RI-GAM menambah bobot keterpisahan Megawati-SBY. Keseluruhan platform PDIP yang nasionalistis semakin memisahkan dua tokoh itu secara politik. Kenaikan harga BBM hanya menjadi penambah saja dari keterpisahan kedua tokoh tersebut.

Dalam Negara demokratis yang matang, menjadi oposisi sama agung dan elegannya dengan pemerintah. namun kita berharap, walau oposisi yang terlembaga lahir, hubungan pribadi antara dua tokoh pemerintah dan tokoh oposisi tetap terjaga. Perbedaan dibatasi hanya pada gagasan dan kebijakan, sedangkan silaturahmi antartokoh seharusnya terus berjalan, sebagaimana yang juga terjadi di Negara demokrasi lain yang sudah matang. *

Politik Api dalam Sekam

Kondisi politik saat ini menyerupai api dalam sekam. Beberapa percik api terbang ke udara dan muncul ke permukaan. Namun di bawah permukaan, terpendam sumber api yang jauh lebih panas. Pada waktunya, sumber api itu bisa meledak dan membakar lingkungannya. Namun mungkin pula, melalui waktu, sumber api itu mengecil dan akhirnya padam.

Berbagai percik api politik mulai muncul ke permukaan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang militan dan berakar, meminta pemerintah merevisi kembali kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bahkan partai ini mengancam untuk mencabut dukungannya kepada pemerintah selama ini. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sudah pula menyatakan ketidaksetujuan mengenai besarnya presentase kenaikan BBM. Mereka khawatir rakyat banyak tidak sanggup memikul tambahan beban akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Para pembentuk opini yang kredibel, baik di bidang politik maupun ekonomi, juga menyatakan keterkejutannya. Mereka adalah akademisi yang rasional dan mendukung perlunya penyesuaian harga BBM. Namun, tingginya persentase kenaikan potensial membuat mereka kehilangan simpati. Pemerintah sekarang dianggap sangat tega dengan beban yang akan dipikul rakyat kecil.

Gerakan mahasiswa mulai semakin menyatu. Sejak tahun 2000-an, gerakan mahasiswa semakin terfragmentasi karena berbagai kepentingan dan persepsi. Isu BBM dan penderitaan rakyat pelan-pelan menyatukan mereka kembali. Seolah kini mereka mendapatkan kembali panggung nasional untuk berperan, sebagaimana yang dulu dipunyai para senior mereka di tahun 1998.

Di parlemen, melalui PKB dan PDIP, di luar parlemen melalui sopir angkot, buruh, ibu rumah tangga, dan artis, gerakan menentang kenaikan drastis BBM semakin luas. Gerakan ini agaknya tinggal menunggu momentum untuk terkonsolidasi. Bulan November, seminggu setelah Lebaran dan setelah setahun SBY, akan menjadi titik kritis. Apakah gerakan itu meluas dan membesar ataukah justru padam, seperti api dalam sekam?

Beberapa kondisi masih membuat politik api dalam sekam ini terhalang untuk meledak. Penghalang pertama adalah meledaknya bom di Bali. Kasus bom sungguh dengan cepat dan efektif sekali menyita perhatian public. Korban yang besar, terutama dari warga asing, tindakan pelaku bom yang bunuh diri, horror dari imajinasi terorisme, adalah drama tersendiri. Pers sangat terpikat dengan isu yang seksi tersebut.

Namun daya pukau bom Bali terbatas. Setelah Lebaran, isu ini segera hilang menghilang. Misteri dan drama bom Bali ini memudar. Saat itulah isu BBM kembali naik ke “tangga lagu”

utama komunitas politik. Apalagi setelah Lebaran, akumulasi kesulitan rakyat banyak akibat naiknya BBM bertambah.

Penghalang kedua adalah euphoria kompensasi. Yang paling menderita akibat kenaikan BBM adalah rakyat miskin. Namun untuk sementara, mereka mengalami euphoria dengan mendapatkan uang tunai sebesar tiga ratus ribu rupiah untuk tiga bulan pertama. Untuk sementara, kompensasi itu dapat mengobati keluhan mereka.

Masalahnya uang itu segera habis. Mungkin belum sampai tiga bulan, apalagi menghadapi lebaran dan mudik, uang itu sudah terbelanjakan. Ketika uang itu habis, mereka segera menghadapi harga barang yang sudah naik. Euforia kompensasi itu mudah sekali berubah menjadi kemarahan. Gerakan orang miskin yang marah segera menjadi rumput yang kering bagi spekulan politik. Sentiment orang miskin itu mudah sekali dibakar dan dibelokkan.

Penghalang ketiga adalah bulan suci Ramadhan. Di bulan ini, banyak umat Islam menahan sabar dan amarah. Ada upaya ekstra untuk tidak melampiaskan emosi jika tidak ingin batal puasa.

Dalam waktu 30 hari, puasa selesai. Kesulitan hidup akibat naiknya harga barang terus dirasakan. Sementara upaya ekstra untuk mengontrol emosi, kekecewaan, dan kemarahan saat itu tidak lagi sekuat di bulan puasa. Waktu setelah selesai bulan puasa segera menjadi hari perhitungan atas kekecewaan, yang dapat mereka ekspresikan sebebas-bebasnya.

Penghalang keempat adalah oportunisme politik. Di antara mereka yang bergerak, banyak sekali spekulan politik yang ternyata hanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Isu BBM dan kemarahan public, dijadikan proyek dalam rangka menaikkan bargaining politik ataupun kompensasi. Setelah dikooptasi, tokoh gerakan ini melempem. Oportunisme politik

ini dapat sangat melemahkan spirit gerakan perlawanan. Namun melalui waktu, akan terseleksi dengan sendirinya. Para spekulasi politik segera ditinggalkan dan digantikan oleh tokoh oposisi yang lebih berwibawa.

November 2005 segera menjadi masa kritis. Akankah November itu ceria, sepi dari aksi protes? Bulan puasa dan aneka peristiwa besar lain dalam politik domestic membuat mayoritas kekuatan politik pasrah dan menerima situasi yang ada. Pemerintah akan semakin kuat. Ibarat api dalam sekam, apinya padam sekamnya tidak terbakar.

Atau sebaliknya, November itu akan menjadi momentum yang besar. Kemarahan publik bangkit serentak. Berbagai elemen masyarakat bersatu kembali dengan slogan kepedulian dengan nasib rakyat kecil. Berbagai pihak terlibat dalam gerakan bersatu itu dengan kepentingan dan motivasi yang berbeda-beda.

Dalam teori gerakan social , ada empat variabel yang bermain untuk menyalakan sebuah aksi protes yang mahabesar. Pertama, akumulasi ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat. Kedua, adanya entrepreneur politik yang mampu menerjemahkan kemarahan itu menjadi gerakan politik. Ketiga, terciptanya jaringan oposisi yang meluas dengan dukungan logistik yang memadai. Keempat, menurunnya wibawa pemimpin nasional karena satu atau hal lain.

Tanpa salah satu dari empat variabel tersebut, gerakan sosial yang muncul akan punya dampak yang terbatas saja. Gerakan itu mungkin cukup mengganggu, tetapi tidak akan punya kekuatan untuk mengubah kebijakan apalagi mengubah kepemimpinan nasional.

Demi konsolidasi demokrasi, kita harap sebesar apapun gerakan yang akan muncul, jika gerakan itu terjadi, jangan berujung pada pergantian kepemimpinan. Sejak awal harus selalu dijaga bahwa sebaiknya perubahan kepemimpinan hanya terjadi lewat pemilu lima tahun sekali. Kecuali jika sang pemimpin melakukan pelanggaran hukum yang mencolok mata. Kinerja pemerintahan dan kebijakan BBM tentu saja tidak termasuk dalam kategori kesalahan konstitusional yang dapat berujung pada pergantian kepemimpinan.

Demi kesehatan demokrasi, gerakan politik yang lahir sebisa mungkin hanya sebatas mengubah kebijakan atau pergantian kementerian saja. Itu terjadi jika api dalam sekam sekarang ini memang menjadi api yang membakar. Namun jika api dalam sekam itu memudar dan mati, perubahan kebijakan itu mungkin tidak akan terjadi. *

Bola Liar Surat Mahkamah Konstitusi

Kontroversi seputar surat Mahkamah Konstitusi kepada presiden menambah panas suhu politik soal BBM. Konflik BBM kini tidak lagi hanya melibatkan aktivis mahasiswa, buruh, ibu rumah tangga, dan politisi di partai politik. Lembaga tinggi negara yang berwibawa, seperti DPR dan kini Mahkamah Konstitusi pun semakin menaikkan level potensi konflik politik.

Selama ini, kontroversi terjadi di kalangan politisi. Pihak yang pro dan kontra kenaikan BBM sudah menyatakan sikap politik masing-masing. Yang kontra menuduh pemerintah tidak lagi memihak rakyat kecil dengan menaikkan minyak tanah setinggi 180%. Sementara yang pro, menyatakan sebaliknya. Kenaikan harga itu justru untuk mengalihkan subsidi kepada rakyat kecil dalam jangka panjang.

Kontroversi juga terjadi di kalangan pengamat ekonomi dan pengusaha. Pihak yang pro dan kontra juga sudah mengelaborasi semua argumennya. Pihak yang kontra menyatakan, secara

ekonomi kenaikan BBM yang terlalu drastis membuat ekonomi masyarakat justru semakin terpuruk. Banyak perusahaan akan gulung tikar. PHK massal segera terjadi. Sementara pihak yang pro menyatakan sebaliknya. Kenaikan BBM adalah pil pahit yang jangka panjangnya justru akan menyehatkan ekonomi nasional.

Melalui surat Mahkamah Konstitusi, kontroversi mulai memasuki wilayah hukum. Pihak yang kontra kenaikan BBM menyatakan, secara hukum kenaikan BBM itu batal karena cacat hukum. Pemerintah dapat dituduh melanggar konstitusi jika bersikeras dengan putusan itu.

Sementara pihak yang pro menyatakan sebaliknya. Tidak ada yang dilanggar pemerintah dengan menggunakan UU No.22 Tahun 2001 mengenai Migas. Mahkamah Konstitusi bahkan dianggap salah alamat. Lembaga itu dianggap tidak berwenang menegur presiden. Kewenangan pengawasan dan peneguran ada pada DPR.

Isu BBM begitu kaya dimensinya. Ia melahirkan kontroversi berdimensi politik, ekonomi dan hukum sekaligus. Di antara tiga dimensi itu, kontroversi hukum jelas yang paling rawan dan kritis.

Kontroversi politik sudah biasa di era demokrasi. Perbedaan persepsi dan kepentingan menjadi jamak dalam masyarakat yang plural. Hampir semua kebijakan penting dan besar yang dibuat pemerintah, apapun substansinya, segera melahirkan sikap pro dan kontra di kalangan komunitas politik.. kebijakan public memang tidak memberikan efek yang sama kepada segmen masyarakat yang beragam. Selalu ada segmen yang lebih diuntungkan dan yang lebih dirugikan.

Melalui waktu, kontroversi politik akan selesai dengan sendirinya. Daya pukai kontroversi politik itu dapat saja

memudar bersamaan dengan publik yang mulai bosan dengan isu itu. Atau sudah datang isu lain dan konflik baru yang lebih segar dan seksi. Media massa segera menggeser dan melupakan isu dan kontroversi lama.

Kontroversi ekonomi juga hal yang lumrah saja. Bahkan di dunia akademik sekalipun, tidak terhindari lahirnya aneka aliran paham ekonomi. Paham liberal dan paham ekonomi kesejahteraan sama sahnya. Namun, dua cara pandang ekonomi itu sangat bertentangan atas peran pemerintah dalam ekonomi.

Melalui waktu, kontroversi dimensi ekonomi itu juga akan memudar. Apalagi, jika kenaikan harga BBM pelan-pelan justru menunjukkan gelagat baik. Misalnya, berbagai indikator penting ekonomi, mulai kurs rupiah, indeks saham, hingga investasi memperlihatkan tren positif.

Kontroversi hukum jelas lebih berbahaya. Jika publik percaya pemerintah sudah melanggar hukum dan politisi memobilisasi opini itu, proses impeachment segera digelar. Berhasil atau tidaknya proses impeachment atas presiden adalah soal lain. Namun, wawancara impeachment itu sendiri sudah menggerogoti wibawa presiden dan menguras banyak sekali energi politik.

Dua ahli tata negara berbeda pandangan mengenai surat Mahkamah Konstitusi. Sri Soemantri dan Yusril Ihza Mahendra, keduanya adalah pakar hukum tata negara. Yang satu menjadi rektor sebuah universitas swasta. Sedangkan yang lainnya adalah bagian dari pemerintah, menjadi Menteri Sekretaris Negara.

Menurut Sri Soemantri, surat Mahkamah Konstitusi itu benar secara hukum. Selayaknya, Mahkamah Konstitusi menyurati presiden bahwa penetapan harga BBM itu cacat hukum karena bersandar kepada Pasal UU No 22 tahun 2001 yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Menggunakan mekanisme

pasar untuk BBM yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak adalah pelanggaran konstitusi.

Menurut Sri Soemantri, kesalahan pemerintah itu harus segera dikoreksi. Jika tidak, ini akan menjadi pintu masuk bagi pemecatan presiden. Selanjutnya, bola ada di tangan Mahkamah Agung. Berbagai pihak dapat meminta judicial review Mahkamah Agung atas penetapan presiden mengenai harga BBM yang baru.

Sebaliknya, Yusril Ihza Mahendra, punya opini hukum yang berbeda. Yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi hanya beberapa pasal. Di luar pasal itu, UU No 22 Tahun 2001 masih berlaku. Tidak ada pelanggaran hukum yang dibuat pemerintah dalam keseluruhan proses, prosedur, dan basis hukumnya.

Surat Mahkamah Konstitusi dapat berakhir dengan tiga skenario. Pertama, surat itu diabaikan. Tidak ada perubahan yang dibuat oleh pemerintahan eksekutif. Pemerintah tetap bersandar kepada argumen yang dinyatakan Yusril Ihza Mahendra. Tidak ada pula ribut-ribut politik. Melalui waktu, surat Mahkamah Konstitusi itu dilupakan.

Kedua, pemerintah melakukan koreksi seperlunya. Konsideran hukum yang menyinggung UU No 22 Tahun 2001 itu dilengkapi dengan tambahan seperlunya sesuai dengan input dari ahli hukum tata negara yang kontra. Harga BBM tetap diberlakukan seperti harga yang ditetapkan pada 1 Oktober 2005.

Jika pilihan kedua yang diambil, ketegangan politik akan sedikit kendur. Namun, koreksi itu akan mengurangi wibawa pemerintah. Segera muncul kesan pemerintah selama ini bertindak ceroboh, sehingga akhirnya harus dikoreksi oleh lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, skenario seperti nomor satu dengan efek politik yang berbeda. Pemerintah mengabaikan surat Mahkamah Konstitusi. Tidak ada perubahan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, oposisi memobilisasi opini dan membuat gerakan kontra pemerintahan. Publik luas mendukung oposisi karena kecewa dengan kenaikan harga BBM. Parlemen memainkan kartu politiknya. Indonesia memasuki era goro-goro politik. Semoga skenario ketiga tidak terjadi. *

Sandungan Setahun SBY-JK

Oktober – Desember 2005 akan menjadi periode tersulit bagi kepemimpinan SBY-JK. Jika tidak direspon secara agak drastic, kesulitan di tahun pertama itu segera terbawa ke tahun kedua pemerintahannya.

Demikian salah satu telaah dari survey nasional terbaru yang diselenggarakan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Survei dikerjakan setelah diumumkannya harga BBM, tanggal 3-7 Oktober 2005, di seluruh provinsi Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Responden berjumlah 1.000, dipilih secara acak, dengan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan tatap muka dengan kuesioner, dan margin of error plus minus 3,2%. Melalui control dan metode yang standar, survey ini diklaim mewakili persepsi seluruh pemilih Indonesia.

Ditemukan setidaknya empat potret buram yang menyulitkan pemerintahan SBY-JK di tahun pertama pemerintahannya.

Pertama, ketidakpuasan atas ekonomi melonjak drastis setelah naiknya harga BBM 1 Oktober 2005. survei sebelumnya (Agustus 2005), sekitar 37,1% dari responden mengatakan kondisi ekonomi saat itu buruk. Setelah kenaikan harga BBM, berdasarkan survei pada Oktober 2005, yang menyatakan ekonomi saat ini buruk melonjak ke angka 57,5%. Ini jelas angka yang sangat tinggi dan sudah menjadi mayoritas. Ketidakpuasan ekonomi sangat rawan dimobilisasi menjadi gerakan politik.

Kedua, setelah BBM naik, oposisi juga mendapatkan momentum. Di luar isu BBM, dukungan atas SBY-JK selalu lebih tinggi dibandingkan dengan dukungan atas oposisi. Walaupun SBY-JK dihadap-hadapkan dengan lima sekawan (Gus Dur, Megawati, Akbar Tandjung, Wiranto, dan Try Soetrisno), publik lebih mendukung SBY-JK. Namun, jika yang dibawa oposisi adalah perlawanan terhadap kenaikan BBM, mayoritas pemilih berdiri di belakang oposisi. Untuk isu BBM, 51,7% mendukung lima sekawan, sementara SBY-JK hanya didukung 26,4%. Jika oposisi memainkan isu BBM itu dengan masif, tidak mustahil terbentuk kelompok oposisi yang berpengaruh dengan dukungan segmen masyarakat yang sangat luas.

Ketiga, untuk pertama kali dalam setahun pemerintahan SBY-JK, popularitas SBY merosot pada titik terendah. Sebelum kenaikan BBM 1 Oktober 2005, serendah-rendahnya popularitas SBY, ia masih mendapatkan dukungan di atas perolehan suaranya pada pemilu presiden putaran kedua (>60%). Namun, setelah BBM naik untuk kali kedua di bulan Oktober 2005, untuk pertama kali popularitas SBY merosot di bawah 60%, atau tepatnya hanya 52,4%. Tanpa upaya berarti, popularitas SBY dapat terus merosot seiring dengan memburuknya persepsi atas ekonomi nasional.

Keempat, aliansi partai politik di belakang SBY-JK juga mulai bermanuver. PKS mengancam akan menarik dukungan karena kecewa dengan berbagai hal, termasuk tingginya kenaikan harga

BBM. Golkar tidak kalah sigap memainkan kartu truf untuk menambah kursi kementerian. Partai Demokrat merasa kurang diakomodasi. Sementara PPP dan PKB versi Gus Dur terus menggalang kekuatan karena kecewa dengan kadernya sendiri di kementerian SBY yang berposisi. Partai gurem, seperti PBB, tidak kalah gelisah khawatir terlempar dari kementerian jika terjadi kocok ulang kabinet. Manuver aneka partai pendukung itu semakin menambah panas temperatur politik nasional.

Apa yang menjadi penyebab empat potret buram pemerintahan SBY-JK di tahun pertama? Banyak sebab yang dapat diidentifikasi. Pertama, sebab musabab yang sepenuhnya di luar kontrol SBY-JK, seperti bencana alam, bencana penyakit dan ekonomi global. Siapa pun yang terpilih presiden saat ini, bencana alam tsunami dan naiknya harga minyak dunia akan datang. Itu semua memberikan pengaruh besar bagi ketahanan ekonomi nasional dan keresahan sosial.

Kedua, sebab musabab akibat setting kelembagaan politik Indonesia pasca-reformasi. System kita menggabungkan system presiden yang dipilih secara langsung dengan sistem multipartai. Para ahli menyatakan, itu kombinasi sistem politik yang sangat buruk. Selalu mungkin terjadi terpilih presiden dari partai kecil. SBY menjadi contoh konkret.

Akibatnya, politik akomodasi harus terus-menerus dijalankan SBY untuk mendapatkan dukungan luas di parlemen. Banyak menteri yang dinilai memiliki kapabilitas yang rendah ataupun ditolak masyarakat secara luas. Namun, karena ingin melebarkan dukungan politik di parlemen, akomodasi dilakukan. Praktik akomodasi itu terus mewarnai dalam pengambilan kebijakan publik selanjutnya. Di satu sisi, politik akomodasi itu dapat positif, tetapi di sisi lain dapat pula berakibat pada kebijakan yang tidak sensitif kepada sentimen publik.

Ketiga, sebab musabab akibat kapabilitas pemerintahan sendiri. SBY-JK memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. SBY bergaya seorang intelektual, yang mengambil keputusan menunggu kelengkapan informasi dan waktu. Keputusannya matang, namun kadang dirasakan pula terlalu lama dan ragu-ragu. Sebaliknya, JK bergaya seorang dealer maker dan inovator. Ia berani membuat terobosan yang beresiko yang dikerjakan dalam waktu cepat. Di satu sisi, gaya seperti itu dapat menjadi gas bagi “mobil” Indonesia yang jalannya pelan. Di sisi lain, dapat pula gaya itu dianggap menabrak rambu-rambu.

Setahun pertama pemerintahan SBY-JK banyak diwarnai oleh dua gaya itu yang saling beradaptasi. Kombinasi aneka masalah tersebut, mulai dari gaya kepemimpinan, hubungan presiden-wapres, kapabilitas menteri, dan kecurigaan terjadinya conflict of interest kementerian ekonomi, ikut membuat gonjang-ganjing kondisi.

Namun, setahun SBY-JK juga ikut memupuk modal dasar yang sangat berguna di tahun kedua pemerintahan. Publik masih percaya dengan personaliti SBY. Terlepas dari kinerja pemerintahannya, SBY masih dipercaya publik sebagai tokoh yang jujur, punya perhatian pada rakyat dan mampu memerintah. Gebrakan pemberantasan korupsi juga cukup dirasakan public luas. Sementara semangat entrepreneur dan inovatif Jusuf Kalla dapat melengkapi gaya kepemimpinan SBY.

Tahun kedua, diharapkan SBY-JK melakukan tindakan drastic. Gaya kepemimpinan dwitunggal ini diharap saling mengisi satu sama lain. Selayaknya, SBY lebih berperan di muka. Jusuf Kalla tetap berperan besar seperti sedia kala, namun lebih menarik diri ke belakang. Strong leadership yang diharapkan publik luas harus lebih ditampakkan oleh figur presiden.

Kapabilitas pemerintahan di tahun kedua dapat pula ditingkatkan dengan mengocok ulang kementerian. Tanpa tindakan yang agak drastis, aneka potret buram yang muncul di tahun pertama dapat terus hadir di tahun kedua.*

Momentum SBY-JK Tahun Kedua

Wakil presiden JK (Jusuf Kalla) tetap merupakan partner politik yang paling mahal bagi Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). JK adalah pemimpin partai terbesar dan mampu mengendalikan parlemen. JK juga seorang deal maker, berani mengambil resiko dengan kalkulasi rasional. Ia menjadi solusi banyak problem besar pemerintahan SBY-JK di tahun pertama.

Namun di tahun kedua, JK harus lebih low profile dan bermain di belakang layar. Kontribusinya bagi pemecahan masalah pemerintahan tetap seperti dulu, namun penampilan publiknya yang harus lebih "menarik diri". Ini perlu dilakukan agar citra pemimpin yang kuat tetap harus berada pada figur presiden. Jika tidak, isu matahari kembar, dualisme kepemimpinan, dan rivalitas justru akan mengganggu pemerintahan di tahun kedua.

Ini salah satu telaah dari hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 3-7 Oktober 2005. Seribu (1.000) responden dipilih secara acak dari seluruh provinsi di

Indonesia, berdasarkan metode multi stage random sampling. Wawancara dilakukan dengan tatap mata. Margin of error sekitar 3.2%.

Dari hasil survei LSI, cukup mengagetkan bahwa pemilih melihat peran Presiden SBY tidak menonjol dibandingkan Wakil Presiden. Hanya 43% yang menyatakan SBY lebih berperan. Di bidang ekonomi, persentasenya lebih kecil lagi. Hanya 33,8% yang menyatakan SBY lebih berperan. Jauh lebih banyak pemilih yang menyatakan peran SBY dan JK sama saja atau JK lebih berperan.

Persepsi public ini mengonfirmasi berbagai wacana yang cukup mengganggu citra pemerintahan setahun SBY-JK. Isu matahari kembar, dualisme kepemimpinan, rivalitas SBY-JK, duet dan duel SBY-JK menjadi lelucon politik yang mengurangi kewibawaan pemerintahan. Apakah wacana itu benar-benar faktual atau tidak, namun persepsi itu sendiri cukup mengganggu.

Opini public sangat dipengaruhi oleh persepsi. Kurang dominannya peran SBY selaku presiden dalam system presidensialismenya sangat mungkin dipengaruhi oleh aneka impresi selama setahun SBY-JK. Selama setahun memerintah, dua isu yang sangat menyita media massa adalah isu kenaikan BBM dan perdamaian Helsinki antara Republik Indonesia dan GAM. Dalam dua isu utama itu, terkesan Wakil Presiden lebih berinisiatif.

Soal BBM misalnya, Presiden tampak lebih berhati-hati. SBY, misalnya, sempat mengatakan, kenaikan BBM menunggu kompensasi selesai. Atau kenaikan BBM sekitar 50%. Atau kenaikan BBM setelah Oktober 2005 atau bahkan tahun depan.

Sementara dalam wacana publik pula, wakil presiden JK adalah orang pertama yang tegas sekali mengatakan bahwa kenaikan BBM akan dilakukan sebelum puasa. Alasannya, bulan puasa adalah waktu sangat tepat untuk berhemat. Di hari biasa, rakyat makan tiga kali. Namun di bulan puasa, rakyat makan dua kali saja. Kenaikan BBM juga mungkin di atas 50%. Menurut wapres, skenario kenaikan itu sedang dipelajari. Pilihannya memang naik secara bertahap atau sekaligus.

Proses akhir kebijakan publik soal BBM itu memang di tangan presiden. Namun public menyaksikan yang kemudian berlaku adalah apa yang sejak awal diwacanakan Wakil Presiden, bukan oleh presiden. Hal ini memberikan impresi tertentu mengenai peran keduanya.

Hal yang sama terjadi pada soal Aceh. Adalah JK yang berpengalaman mengatasi wilayah konflik di Poso. Saat itu, Hamid Awalluddin sudah menjadi asisten JK. Kini pasangan yang sama terlibat dalam penanganan Aceh.

Sejak awal sekali, JK memang menyebut ditugaskan presiden untuk mengatasi masalah Aceh. Namun setelah itu, sangat kental sekali terkesan bahwa perdamaian Aceh sepenuhnya berada dalam kontrol Wakil Presiden. Terlebih lagi setelah terjadi resistensi dari kalangan purnawirawan militer. Wakil presiden yang terkesan lebih mengambil inisiatif.

Sebenarnya selama setahun SBY-JK, dua tokoh itu sudah memainkan peran sesuai dengan karakter masing-masing. SBY lebih tampil selaku presiden yang ingin mengambil putusan dengan matang. Ia memerlukan informasi yang lengkap dulu. Ia perlu tahu secara komprehensif dampak kebijakan itu bagi public luas. Ia juga punya sense of timing, seperti kapan sebaiknya kebijakan dibuat. Namun, semua gaya leadership ini memerlukan waktu lebih panjang sebelum mengambil putusan.

Sebaiknya, JK lebih bertipe deal maker. Ia berani mengambil resiko untuk sebuah putusan besar. Ia bertindak sangat cepat dengan kalkulasi rasional. Gaya bicaranya sangat straight to the point, kurang diplomasi. Namun justru gaya itu yang membuatnya terkesan cepat mengambil putusan dan high profile.

Kombinasi dua gaya di atas sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Namun jika digabungkan, gaya Wapres terkesan lebih dominan. Ini menjadi bermasalah karena dalam system presidensial dan aturan konstitusi, figure presiden yang seharusnya lebih dominant di mata public. Sekali lagi, di garis bawah kata “dimata public”, karena yang dinilai dalam kolom ini adalah persepsi public. Sementara persepsi bisa berbeda dengan fakta yang sebenarnya.

Memasuki tahun kedua, SBY-JK dapat mengikuti Gerge Bush dan Dick Cheney di Amerika Serikat tahun 2001. setelah wakil presiden Dick Cheney banyak dikritik berperan seolah-olah menjadi the real president atau the acting prime minister, ia menjadi low profile. Di tahun kedua, walau tetap berperan, tetapi Dick Cheney selaku wapres lebih membiarkan George Bush untuk tampil selaku pemain utama.

Penataan ulang hubungan presiden dan wapres jauh lebih signifikan efeknya ketimbang reshuffle cabinet. Walau kabinet berulang-ulang dikocok, jika hubungan presiden dan wapres tidak berubah, citra pemerintahan kurang terbantu maksimal. Isu reshuffle hanya berarti jika memang hubungan presiden dan wapres mengalami perubahan yang berarti.

Survey LSI juga menemukan bahwa mayoritas (65,9%) responden menginginkan reshuffle kabinet. Tuntutan reshuffle itu cukup merata di berbagai segmen masyarakat. Namun, lebih kuat gaungnya di kalangan terpelajar. Adapun yang menjadi

sumber tuntutan reshuffle itu adalah ketidakpuasan public yang semakin luas dan dalam atas situasi ekonomi.

Isu reshuffle bahkan tidak hanya berhubungan dengan kinerja kabinet di tahun kedua nanti. Isu itu justru berhubungan langsung dengan citra Presiden SBY sendiri. Beberapa menteri sudah menjadi beban presiden karena daya tolak pasar terhadapnya sangat tinggi. Jika presiden tidak mereshuffle tokoh itu, segera kembali terbentuk citra bahwa presiden sudah tersandera oleh kekuatan lain. Citra itu kembali mengganggu wibawanya untuk tampil sebagai strong leader.

Isu lain yang penting adalah mesin politik tambahan bagi presiden. Saatnya SBY punya lingkaran yang berfungsi sebagai think-tank sekaligus konektornya dengan kekuatan social politik masyarakat. Memimpin politik Indonesia yang terfragmentasi, tidak cukup dengan mengendarai partai, parlemen atau kabinet saja. Berbagai kekuatan civil society perlu pula diajak serta. Perlu sebuah think-tank dan konektor untuk memikirkan dan menjalankan semua mesin politik itu.

Tahun kedua kini menjadi momentum bagi SBY-JK untuk meningkatkan kapabilitas pemerintahannya, melalui sinergi baru hubungan presiden-wapres, reshuffle kabinet dan mesin politik tambahan bagi presiden. *

Menunggu Sinyal Perubahan SBY-JK

Publik saat ini menunggu big bang ketiga yang justru paling penting, yaitu big bang yang menjadi sinyal akan datangnya perubahan kesejahteraan ekonomi. Dua big bang lain baru saja dikibarkan SBY-JK. Pertama, big bang penanggulangan terorisme dengan tewasnya gembong Azahari. Kedua, big bang penanggulangan narkoba dengan terbongkarnya satu pabrik besar obat terlarang.

Dibandingkan dengan big bang pertama dan kedua, big bang ketiga memang paling ditunggu. Kesejahteraan ekonomi itu langsung berhubungan dengan kebutuhan paling dasar mayoritas publik saat ini.

Harga kebutuhan pokok kini menjulang tinggi. Sejak krisis ekonomi 1998, inflasi saat ini adalah yang tertinggi. Di berbagai pelosok Tanah Air, semakin sering terdengar keluhan hidup rakyat, terutama di tingkat grassroot. Semakin banyak buruh

yang merasa upah mereka terkuras untuk biaya transportasi. Semakin sedikit sisa uang untuk keperluan lain.

Angka pengangguran juga semakin tinggi. Diprediksi setiap tahun muncul skitar hampir dua juta angkatan kerja baru. Sementara pertumbuhan ekonomi 1% hanya mampu menampung sekitar 200.000 angkatan kerja baru. Agar semua angkatan kerja baru terakomodasi, diperlukan pertumbuhan ekonomi sekitar 8-10%. Karena pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi di bawah 6%, dengan sendirinya akan ada tambahan pengangguran terbuka.

Kondisi ekonomi negara juga dalam kondisi sesak napas. Perhitungan sementara keseluruhan aset dan utang, ternyata kekayaan negara menunjukkan posisi di angka minus. Dengan kata lain, keuangan negara terancam bangkrut. Semakin sedikit dana yang bisa disalurkan untuk pembangunan, apalagi program kesejahteraan. Semakin kecil pul dana yang tersedia untuk memelihara dukungan politik.

Yang tidak menguntungkan, dikala ekonomi bermasalah, politik Indonesia juga rawan dengan konflik. Di satu sisi, politik memang terfragmentasi. Tidak ada partai besar yang mempunyai dukungan di atas 30%. Sementara desain kelembagaan pasca-reformasi juga sangat buruk. Presiden dipilih langsung dalam sistem multipartai yang ekstrem. Akibatnya, presiden yang terpilih selalu mungkin datang dari partai menengah atau partai kecil. Jika tidak lihai, presiden dapat tersandera oleh koalisi partai besar di parlemen.

Namun, tidak boleh ada ruang lagi untuk pesimistis. Situasi akan semakin terperosok. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah harapan baru. Yang kita inginkan saat ini adalah sebuah sinyal bahwa perubahan itu memang akan datang dan

terrealisasi. Sinyal perubahan terpenting untuk saat ini memang di bidang ekonomi.

Reshuffle kabinet, pergantian awak tim presiden, dipertegasnya platform ekonomi dapat menjadi sinyal awal. Dengan melakukan perombakan tim ekonomi, presiden memberikan tiga sinyal sekaligus.

Pertama, presiden merespon tuntutan pasar. Keinginan reshuffle kabinet tidak hanya menjadi tuntutan partai politik, politisi, atau kalangan profesional. Riset yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di bulan Oktober 2005, dengan responden di seluruh Indonesia, menunjukkan kebutuhan yang sama. Mayoritas masih yakin dengan presiden saat ini, namun ingin presiden merombak tim ekonominya.

Kedua, presiden memberikan punishment kepada menteri yang kurang berkarya. Reshuffle itu akan menjadi warning yang baik bagi para menteri untuk bekerja lebih serius di kemudian hari. Penyebab menteri kurang berkarya memang banyak. Itu mungkin disebabkan oleh kendala ekonomi global, problem koordinasi, kelemahan pada implementasi, trust publik yang rendah kepada tokoh menteri, atau para leadership dan kompetensi sang menteri sendiri.

Ketiga, presiden membuka peluang terbentuknya tim ekonomi yang lebih solid, lebih kompeten, dan lebih terhindar conflict of interest. Di kala normal saja, diperlukan mesin penggerak yang sangat kuat dan terkoordinasi untuk menumbuhkan ekonomi. Apalagi saat ini kondisi tidak bisa dikatakan normal. mesin penggerak yang dibutuhkan memang agak sedikit ekstraordinari.

Persoalannya sekarang adalah siapa yang harus diganti? Apa kriterianya? Siapa yang mengganti? Apa konsekuensi politiknya?

Justru disini pangkal kompleksitasnya. Memilih dan mengganti menteri memang merupakan hak prerogatif presiden. Dalam sistem presidensialisme ala Indonesia, presiden punya otoritas penuh mengangkat dan memberhentikan para menteri tanpa perlu konsultasi dengan pihak manapun. Ini aturan normatif yang tercantum dalam konstitusi resmi nefara.

Namaun dalam kenyataan politik, situasi tidak semudah itu. Di era demokrasi yang sangat terfragmentasi seperti di Indonesia saat ini, presiden hanya salah satu pemain politik. Pemain lainnya adalah para elite partai yang mempunyai pengaruh di parlemen.

Bagaimanapun, presiden butuh dukungan parlemen. Untuk membuat anggaran dan UU, parlemen menjadi partner presiden. Bahkan untuk kontrol pemerintahan, parlemen dapat membuat susah presiden. Selalu saja ada masalah dalam kinerja presiden dan kabinet. Jika parlemen tidak ramah, semua masalah itu dapat diperbesar dengan mikroskop yang alat pembesarnya berkali-kali lipat.

Akibatnya, penyusunan menteri memang menjadi ajang kompromi politik. Dalam daesain seperti itu, sulit membayangkan presiden dapat melenggang kangkung memilih menterinya seorang diri, tanpa berkonsultasi dengan beberapa pimpinan partai besar. Menyusun kabinet berdasarkan kompetensi teknis semata, sebagaimana lazim dalam kategori zaken kabinet, akan mengalami banyak gangguan di parlemen.

Namun jika kabinet terlalu di kompromikan, presiden sendiri yang akan terkena getahnya. Buruknya kinerja menteri yang bersangkutan akan segera menurunkan level kinerja presiden secara keseluruhan. Menteri akan bekerja tidak hanya untuk presiden tetapi juga untuk kepentingan partainya.

Yang terbaik tampaknya memang jalan tengah. Posisi menteri yang sngat strategis di bidang ekonomi, sebaiknya memang

diberikan kepada profesional atau teknokrat. Beberapa menteri di portfolio ekonomi harus dipastikan berasal dari mainstream dan platform ekonomi yang sama. Jika tidak, akan terjadi pertarungan persepsi dan warna kebijakan antar menteri.

Di luar kementerian ekonomi strategis, dapat ditawarkan kepada beberapa partai mitra koalisi. Dukungan partai akan lebih mudah didapat. Jika menteri yang bersangkutan kurang baik kinerjanya, tidak pula mengganggu kondisi ekonomi nasional.

Karena ekonomi saat ini menjadi kunci, presiden sebaiknya memang mempekerjakan tokoh yang mendapatkan trust publik. Itu yang dapat menjadi sinyal paling cepat dari SBY-JK saat ini, bahwa akan ada perubahan di tahun kedua pemerintahan. *

Konsolidasi Politik Tahun Kedua

TAHUN pertama pemerintahan acap kali menjadi tahun penuh pancaroba. Pemerintah sudah dipaksa untuk bekerja efektif sejak hari pertama dilantik. Sementara tim pemerintahan belum solid dan membutuhkan masa adaptasi serta transisi. Tahun kedua seharusnya menjadi tahun konsolidasi. Pengalaman di tahun pertama menjadi laboratorium yang paling mahal untuk menjadi pijakan. Sementara masa adaptasi dan transisi sudah selesai.

Konsolidasi menjadi penting terutama untuk lapangan politik yang sulit seperti Indonesia saat ini. Sudah menjadi hukum sosial bahwa seorang presiden yang baik tidak otomatis berujung kepada kinerja pemerintahan yang memuaskan. Apalagi jika presiden itu memerintah dinegara yang sangat terfragmentasi secara politik. Area politik tempat presiden itu memerintah penuh dengan akrobat elite politik. Sementara presiden dan wapres hanya mengendalikan sebagian kekuasaan saja, baik di parlemen maupun di luar pemerintahan.

Banyak riset yang sudah dikerjakan untuk tema itu. salah satu yang menonjol adalah karya world bank melalui tiga pakarnya: Jo Ritzen, William Easterly, Michael Woolcock. Studi mereka diberi judul: "On Good Politicians and Bad Policie: Social Cohesion, Institution, and Growth". Studi ini menceritakan betapa fragmentasi politik dimasyarakat akhirnya dapat membuat good politicians membuat bad polices.

Di mata public luas, SBY dipandang sebagai presiden yang baik. Diukur dari tiga criteria: kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas, skor SBY sangat tinggi. Terlepas dari dinamika sratus hari pemerintahannya, SBY masih dianggap kapabel, berintegritas, dan masih populer di mata mayoritas pemilih Indonesia. Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia Oktober 2005 membuktikan hal itu.

Namun, SBY menghadapi politik Indonesia yang sangat terpecah belah. Ia terpilih dalam system pemilihan presiden langsung. Namun, partai yang mendukungnya adalah partai kecil. Mayoritas anggota parlemen bukan berasal dari partainya. Di luar parlemen, berbagai kekuatan civil society, pers, dan tokoh yang berengaruh tidak kalah terfragmentasi.

Suka atau tidak, SBY secepatnya harus memperkuat mesin politik yang bekerja untuknya. Mesin politik itu tidak cukup hanya mengandalkan lembaga presiden dan birokrasi pemerintahan. Bahkan mesin politik itu tidak juga hanya mengandalkan kekuatan parlemen. Mesin politik itu harus juga mampu menjadi konektor presiden dengan berbagai kekuatan dan simpul masyarakat.

Tahun 2006 menjadi tahun pertarungan bagi SBY. Tahun ini harus menjadi tahun konsolidasi kekuatan politiknya. Jika tidak, good politicians dapat berakhir membuat basd policies,

akibat harus melayani dan merespon beraneka kekuatan politik dengan vested interestnya masing-masing.

Setahap demi setahap memang terlihat terjadinya konsolidasi kekuatan politik di belakang SBY. Sebelum pemilu presiden putaran kedua berakhir di ujung tahun 2004, muncul fenomena koalisi kebangsaan yang sangat powerful di belkang competitor SBY, Megawati. Koalisi ini terdiri dari tiga partai terbesar: Golkar, PDIP, dan PPP. Koalisi ini juga mampu merangkul Hasyim Muzadi yang merupakan ketua umum (non aktif saat itu) ormas terbesar di Indonesia, NU.

Koalisi kebangsaan juga bersepakat, jika calon mereka kalah, mereka tetap bersatu menjadi oposisi. Bisa dibayangkan begtu dasyatnya kekuatan oposisi atas presiden SBY jika komitmen Koalisi kebangsaan terealisasi. Koalisis itu menguasai mayoritas suara di parlemen. Koalisi itu juga dapat terus main mata dengan NU melalui Hasyim Muzadi.

Namun diujung 2004 dan di awal 2005, konsolidasi politik SBY terjadi. Koalisi kebangsaan itu hancur perlahan-lahan. Partai Golkar selaku penyangga utama koalisi kebagsaan mengalami perubahan radikal. Pimpinan koalisi, Akbar Tandjung, dikalahkan oleh Wakil Presiden JK. Golkar pun berputar arah, dari pemimpin oposisi kini menjadi instrumen penyangga pemerintah eksekutif yang paling efektif.

Konsolidasi politik pemerintahan SBY tampak sangat mencolok sekali dengan melemahnya oposisi secara kelembagaan. Khususnya, hal itu semakin mencolok dengan mengamati nasib koalisi kebangsaan dan eksponen pendukungnya.

Konsolidasi penting berikutnya yang mesti ditempuh pemerintah SBY adalah di luar parlemen dan diluar partai

politik. Bangunan politik sebuah negara tidak hanya diisi oleh partai politik saja. Juga menjadi elemen politik penting adalah civil society, pers, tokoh individual berpengaruh.

Mobilisasi dukungan politik dari luar parlemen dan partai bagi SBY menjadi penting. Tidak bisa dihindari, oposisi akan terus muncul diparlemen atas pemerintahan SBY. Apalagi pemerintahan SBY adalah pemerintahan minoritas karena pemerintahan minoritas karena hanya mengendalikan minoritas anggota parlemen. Yang sepenuhnya mampu dikendalikan SBY dan JK hanyalah Partai Demokrat dan Partai Golkar. Sementara gabungan dua partai ini masih jauh di bawah 50%.

Konstruksi politik itu menyulitkan SBY-JK untuk menggolkan kebijakan tidak populer seperti kenaikan BBM. Dengan segera, SBY-JK menjadi tawanan parlemen karena parlemen tahu persis mayoritas publik tidak mendukung kebijakan tidak populer itu, walaupun parlemen juga menyadari kenaikan BBM itu perlu untuk ekonomi yang sehat jangka panjang.

Karena tidak sepenuhnya mampu mengendalikan parlemen, kekuatan politik di luar parlemen harus pula dimobilisasi oleh SBY-JK. Bahkan, jika parlemen terkesan beroposisi secara buta, asal beda dengan presiden, kekuatan civil society itu yang dapat dimobilisasi.

Tahun 2005 ini akan diwarnai oleh tarik-menarik kekuatan civil society, pers, dan tokoh individu yang berpengaruh. Pihak presiden SBY tentu berkepentingan agar mampu berpartnership dengan kekuatan civil society itu. Sebaliknya, oposisi atas SBY memiliki argument yang sama untuk membuat civil society menjauh dari SBY.

Sejauh SBY-JK meawarkan gagasan dan kebijakan yang menarik bagi kekuatan di luar parlemen, konsolidasi politik SBY-JK di tahun 2006 akan semakin kuat. Jika tidak, kita kembali akan melihat pemerintahan yang tidak efektif. Ini

akan membenarkan hasil riset World Bank itu mengenai good politicians yang dipaksa melahirkan bad policies. *

Aceh Pasca-MoU Helsinki

TANGGAL 4 Desember 2005, GAM (Gerakan Aceh Merdeka) berulang tahun. Apakah event ulang tahun GAM berbeda dengan sebelumnya, mengingat telah disepakatinya MoU Helsinki? Akankah GAM melakukan langkah tidak biasa atau inovasi yang mendorong rekonsiliasi di Aceh, dengan sepenuhnya menerima NKRI dan UUD 45? Ataukah dengan resiko politik, GAM bertahan dengan ide self government bagi Aceh? GAM, misalnya, menginginkan Aceh berkembang seperti Hongkong di RRC atau Skotlandia di Inggris, dengan otonomi yang sangat luas.

GAM sudah berumur tiga puluh tahun. Berbagai presiden Indonesia datang dan berganti menangani konflik Aceh, mulai dari Soeharto, Habibie, Gus Dur, sampai Megawati. Aneka pendekatan sudah dilakukan mulai dari penanganan militer sampai dengan dialog yang melibatkan pihak internasional. Namun, Aceh terus berdarah.

Kini, datang penyelesaian baru yang dibawa pemerintahan SBY-JK melalui MoU Helsinki. Bagaimana prospek rekonsiliasi di Aceh? Akankah upaya penyelesaian Aceh kembali gagal disepakati elite yang berpengaruh di Aceh dan pemerintahan pusat? Ataukah MoU Helsinki itu berbeda, menjadi jimat yang secara bertahap menyatukan warga Aceh ke dalam pangkuan Indonesia kembali?

Pertanyaan ini yang menggerakkan riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Survei dilakukan pada 24-30 Oktober 2005.

Responden dipilih secara acak di seluruh wilayah Aceh. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling. Jumlah responden 440 orang dewasa. Wawancara dikerjakan dengan tatap muka. Margin of error 5% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Tampak potret warna-warni di Aceh pasca MoU Helsinki. Ada yang cerah, ada pula yang masih buram dan berpotensi menjadi krikil bagi rekonsiliasi. Yang cerah, mayoritas public di Aceh (76,5%) berpandangan MoU Helsinki membut kondisi Aceh lebih baik. Opini yang positif ini dirasakan semua segmen public Aceh, dilihat dari usia, gender, tingkat pendidikan, status ekonomi, ataupun teritori. MoU Helsinki menjadi sebuah breakthrough yang menumbuhkan harapan baru.

Perbedaan mencolok yang dibawa MoU Helsinki itu adalah rasa aman. Kebutuhan rasa aman adalah basic need utama warga negara. Mayoritas publik Aceh kini (68,1%) merasa aman dan hidup normal di Aceh. Yang merasa keamanan di Aceh buruk hanya 9,6%. Bahkan rasa aman public Aceh terhadap kondisi Aceh lebih tinggi daripada rasa aman public Indonesia lainnya terhadap wilayahnya masing-masing. Di tingkat nasional, yang merasa keamanan baik hanya 40,4%. Sementara

yang menyatakan keamanan buruk 23,5%. Pulihnya rasa aman menjadi kapital sosial yang sangat dibutuhkan untuk kembali membangun komunitas aceh.

Namun, LSI juga merekam potret yang masih buram. Nasionalisme dan sentimen publik Aceh terhadap Indonesia sangat rendah. Keterikatan umumnya public Aceh dengan keindonesiaan jauh sekali dibandingkan saudara sebangsanya di wilayah lain di seluruh Indonesia.

Tiga indicator digunakan untuk mengukur sentiment keindonesiaan atau nasionalisme. Pertama, identifikasi terhadap keindonesiaan melampaui identifikasi terhadap asal muasal suku dan agama. Kedua, tumbuhnya rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Ketiga, kesediaan berperang mempertahankan NKRI.

Di tingkat nasional, 76,4% publik lebih mengidentifikasi diri dengan Indonesia ketimbang dengan asal muasal suku atau agama. Sementara di Aceh identifikasi itu hanya 45,5%. Di tingkat nasional, 93% public bangga menjadi warga negara Indonesia. Sementara di Aceh, kebanggaan itu hanya dirasakan oleh 56,5%. Di tingkat nasional, 80,1% public bersedia berperang untuk NKRI. Sementara di Aceh hanya 35% yang bersedia mempertahankan NKRI dengan terjun ke medan perang.

Dari tiga indikator itu, terbaca bahwa sentimen publik Aceh terhadap Indonesia memang sangat berbeda dengan rata-rata public Indonesia di wilayah luar Aceh. Di kalangan muda Aceh, bahkan sentimen keindonesiaan itu semakin rendah. Survei LSI memperkuat sinyalemen bahwa di Aceh memang lahir generasi muda yang lebih marah, atau lebih radikal. Mereka merasa semakin asing dengan keindoesiaan. Rendahnya sentimen keindonesiaan menjadi krikil bagi rekonsiliasi.

Mengapa? Apa yang menyebabkan sebagian besar publik Aceh merasa jauh dari sentimen keindonesiaan? Pertama, representasi Indonesia di Aceh itu adalah pemerintahan resmi. Kinerja pemerintah dianggap tidak memuaskan. Kepercayaan publik Aceh terhadap DPRD, DPD, bahkan partai politik sangat rendah. Hanya 33,5% yang percaya pada DPD; 29,1% percaya kepada DPRD; dan 24% percaya kepada partai politik. Jauh lebih banyak publik Aceh yang lebih percaya kepada organ masyarakat seperti mahasiswa (56,3%). Padahal justru organ mahasiswa dan umumnya kaum muda paling kritis terhadap sentimen keindonesiaan.

Kedua, mayoritas publik Aceh juga kecewa terhadap situasi politik, hukum dan ekonomi. Yang menyatakan positif terhadap politik hanya 34%; terhadap penegak hukum hanya 24,6% dan terhadap ekonomi hanya 17,4%. Bahkan sebanyak 78,2% kecewa dengan situasi lapangan kerja. Mereka menganggap kondisi itu adalah buah dari kebijakan pemerintah yang merupakan representasi dari keindonesiaan di Aceh. Publik Aceh memang merasa aman setelah MoU Helsinki. Namun MoU Helsinki itu dinggap produk bersama pemerintah RI, GAM, dan pemerintah asing.

Ketiga, sejarah konflik yang panjang di Aceh masih meninggalkan bekas. Sekitar 30 tahun GAM memprovokasi kemerdekaan Aceh dan menanamkan kemarahan kepada keindoesiaan, memang benar kini sudah ada MoU Helsinki namun substansi MoU itu cukup ambigu dan potensial menimbulkan multi tafsir. Jika tokoh GAM menafsirkan MoU itu sebagai legalitas self government, itu tidak kondusif bagi upaya mengentalkan kembali sentimen NKRI di Aceh. Bangunan politik, ketatanegaraan, dan kultur self govertment berbeda dengan NKRI.

What next? Akan berhasilkah rekonsiliasi pasca MoU Helsinki? Even ulang tahun GAM dalam memperingati ulang

tahunnya, dapat menjadi sinyal awal. Rekonsiliasi Aceh akan jauh lebih mudah jika dalam ulang tahunnya, GAM membuat manuver yang tidak biasa. Misalnya, GAM menyerukan publik Aceh tidak perlu meminta self government dan menerima konsep otonomu khusus yang diperluas di bawah NKRI dan UUD 45. *

Kasus Partai Kebangkitan Bangsa

DUA pengeran dari tradisi politik pasantren sudah bertemu, Saefullah Yusuf dan Muhaimin Iskandar. Dua PKB yang bersebrangan mulai dijembatani. Kasus ini lebih besar dari sekedar persoalan PKB saja. Ini gambaran pelembagaan partai politik yang sejak reformasi selalu bermasalah. Seleainya masalah PKB dapat menjadi insentif positif bagi gonjang-ganjing internal yang juga terjadi pada partai lain.

Saya membayangkan sebelum tahun 2005 berakhir, Gs Dur, Muhaimin Iskandar, Alwi Shihab, Saefullah Yusuf duduk satu meja. Mereka ditemani beberapa kiai khos yang sangat dihormati baik dikalangan PKB ataupun NU. Demi keesaran PKB dan stabilitas politik di Indonesia, mereka membuat kesepakatan tertulis, yang ditanda tangani bersama, yang bersifat win win solution bagi semua pihak yang bertikai.

Kesepakatan itu dipublikasikan kepada publik luas agar semakin membuat pihak yang bertikai itu menjalankannya.

Adapun bentuk kesepakatan sangatlah unik. Ungkin ini bentuk elite settlement yang pertama di Indonesia dengan power sharing yang tidak pernah ada presedennya.

Muhaimin Iskandar dan Saifullah Yusuf sendiri yang mengumumkannya. Secara bergantian, mereka saling sahut-sahatan mengumumkan persatuan PKB kembali. Disepakati paruh pertama kepengurusan, yang menjadi Ketua Dewan Syuro dan ketua Umum PKB adalah dari kubu Gusdur-Muhaimin Iskandar kubu Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf. Sedang kubu Gus Dur-Muhaimin secara otomatis juga menjadi wakilnya.

Inilah solusi paling liar yang bisa ditemukan untuk mempersatukan PKB. Di luar solusi itu, dua versi PKB akan saling tarung baik secara hukum ataupun politik. Karena dua versi PKB itu sama kuat, tidak ada pemenangnya. Yang ada semua kalah karena ditinggalkan oleh komunitasnya sendiri.

PKB menjadi contoh ekstrem gagalnya pelembagaan partai politik setelah tujuh tahun gerakan reformasi. Dilihat dari potensinya, sebenarnya PKB termasuk partai yang sangat penting bagi konsolidasi demokrasi di akar rumput. Dibanding semua partai lain, hanya PKB yang potensial menyalurkan suara komunitas Islam terbesar NU. Pemahaman Islam di NU juga sangat moderat, yan dapat menyatu denga pluralisme Indonesia.

PKB menjadi satu kaki yang penting untuk partnership mengelola pemerintahan. Dukungan dan kesertaan PKB dalam pemerintahan segera dapat membuat pemerintahan tersebut bersinergi dengan ratusan pasantren dan jutaan warga negara yang hidup dalam kultur NU. Demokrasi yang awalnya menjadi benda asing segera lebih udah berakulturasi dengan kultur Islam di wilayah pedesaan ataupun perkotaan melalui PKB.

Namun tentu saja PKB yang dimaksud di sini adalah PKB yang solid. Ia solid karena mendapatkan dukungan penuh dari elit dan warga NU yang menyebar di seluruh wilayah nusantara. PKB juga hanya solid jika ia didukung secara total oleh para politisi terbaik yang sejak sepuluh sampai lima tahun terakhir sudah malang melintang dalam kultur politik NU. Soliditas PKB dan NU awalnya sangat terjaga karena peran sentral Gus Dur. Sepuluh tahun silam, Gus Dur adalah matahari tunggal yang dihormati banyak kalangan. Bagi warga NU, Gus Dur adalah pewaris darah biru yang sangat intelektual. Sementara bagi para akademisi, politisi, civil society kala itu, Gus Dur juga menjadi guru bangsa yang banyak diharapkan. Ketika menjadi presiden, dimasa awalnya, tiga kekuatan sekaligus dirankul Gus Dur: PKB, NU dan civil society modern.

Namun pelan-pelan matahari Gus Dur mulai redup. Sebagian disebabkan oleh daya tahan Gus Dur sendiri akibat sakit yang dideritanya. Di tambah lagi, banyak kasus dan gossip yang beredar mengenai Gus Dur yang membuatnya semakin jauh dari citra guru bangsa. Puncak dari persoalan politiknya, Gus Dur dikalahkan pula dalam pertarungan elit NU pasca terpilihnya presiden SBY.

Kini pamor Gus Dur semakin redup karena banyak kiai khos yang mulai meninggalkannya. Dulu ketika Gus Dur konflik dengan Hasyim Muzadi, dengan lantang Gus Dur mengatakan bahwa kekuasaan riil NU tidak ditentukan oleh pemurus structural NU. Yang didengar NU adalah para kiai waskita, para kiai khos yang berada dibelakangnya. Kini kalimat itu tidak dapat lagi diucapkan Gus Dur. Bahkan kiai khos juga mulai meninggalkan Gus Dur.

Sementara di level politisi PKN, tidak semua elit terkemukanya yang masih setia pada Gus Dur. Muhaimin Iskandar, Ali Maskur Musa, dan Effendi Choirie masih menemani dan megikuti Gus Dur. Namun kini semakin muncul barisan politisi lain yang

sudah siap menyatakan tidak kepada Gus Dur. Barisan ini dipimpin Saefullah Yusuf, AS Hikam, Khofifah, dan Alwi Shihab sendiri.

Posisi Saefullah Yusuf dan Alwi Shihab menjadi kuat secara politik karena disamping menjadi menteri dan elit pemerintahan, mereka berdua juga dekat dan didukung oleh kiai khos. Posisi mereka bertambah kuat lagi karena keputusan MA juga cenderung mempekokoh PKB versi Alwi Shihab-Saefullah Yusuf.

Banyak pihak dirugikan jika konflik PKB berlarut-larut. Semakin hari semakin sulit bagi akademisi, pengamat dan publik luas menyebut PKB tanpa keterangan lanjutan. Jika PKB disebut, harus ditambahkan pula itu PKB versi siapa? Apakah itu versi Gus Dur-Muhaimin ataulah versi Alwi-Saefullah?

Calon kepala daerah di wilayah yang didominasi oleh PKB saat itu sangat tidak diuntungkan. PKB versi siapa yang berhak mencalonkan? Konflik internal PKB dapat ikut memprovokasi konflik di beberapa daerah akibat ketidakjelasan posisi calon. Para pendukung calon kepala daerah PKB dari dua versi itu dapat pula terlibat konflik masal yang emosional.

Namun yang paling dirugikan oleh konflik yang semakin parah itu adalah konsolidasi demokrasi di Indonesia sendiri. Bagaimanapun, PKB selama ini diharapkan menjadi penyalur aspirasi grass-root komunitas NU yang merupakan representasi umat Islam terbesar. Dukungan NU melalui PKB membuat hubungan Islam dan demokrasi dapat bersenyawa lebih mudah.

Di NU dan PKB sudah berkumpul berbagai kiai waskita yang sangat dikenal ketinggian spiritualnya. Dalam komunitas PKB dan NU sudah bermunculan pula para politisi profesional dengan jam terbang tinggi. Kini mereka dites untuk mencari

solusi terbaik bagi PKB. Win-win solution dan kerelaan untuk sedikit mengalah dalam rangka kepentingan bersama adalah sikap mental yang dibutuhkan.

Semoga dalam waktu dekat kita akan mendenar berita baik rujuk PKB. *

Daftar Buku Denny J. A

1. *Democratization From Below Protest Events And Regime Change In Indonesia*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
2. *The Role Of Government In Economy And Business*, Penerbit LKIS, 2006
3. *Various Topics In Comparative Politics*, Penerbit LKIS 2006
4. *Demokrasi Indonesia: Visi Dan Praktek* (Kumpulan Tulisan di Harian Kompas), Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006
5. *Jalan Panjang Reformasi* (Kumpulan Tulisan di Suara Pembaruan), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
6. *Melewati Perubahan*, Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia (Kumpulan Tulisan di Jawa Pos dan Indopos), Penerbit LKIS, 2006
7. *Politik Yang Mencari Bentuk* (Kumpulan Kolom di Majalah Gatra), Penerbit LKIS, 2006
8. *Membangun Demokrasi Sehari-Hari* (Kumpulan Tulisan di Media Indonesia), Penerbit, LKIS 2006
9. *Partai Politik Pun Berguguran* (Kumpulan Tulisan di Republika), Penerbit LKIS 2006
10. *Manuver Elit, Konflik Dan Konservatisme Politik* (Kumpulan Tulisan di Koran Tempo), Penerbit LKIS 2006

11. *Para Politisi Dan Lagunya* (Kumpulan Tulisan di Rakyat Merdeka dan Harian Seputar Indonesia), Penerbit LKIS 2006
12. *Memperkuat Pilar Kelima, Pemilu 2004 Dalam Temuan Survei LSI*, Penerbit LKIS 2006
13. *Visi Indonesia Baru Setelah Reformasi 1998*, Penerbit LKIS 2006
14. *Catatan Politik*, Penerbit LKIS 2006
15. *Jatuhnya Soeharto Dan Transisi Demokrasi*, Penerbit LKIS 2006
16. *Membaca Isu Politik*, Penerbit LKIS 2006
17. *Gerakan Mahasiswa Dan Politik Kaum Muda Era 80-An*, Penerbit LKIS 2006
18. *Election Watch : Meretas Jalan Demokrasi* (Talkshow Denny J.A di Metro TV), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
19. *Parliament Watch: Eksperimen Demokrasi: Dilema Indonesia* (Talkshow Denny J.A. di Metro TV), Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006
20. *Napak Tilas Reformasi Politik Indonesia* (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006
21. *Jejak-Jejak Pemilu 2004* (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006